

Wiwin Erni S. N. • Herawati

# Laras Pidato dalam Bahasa Indonesia

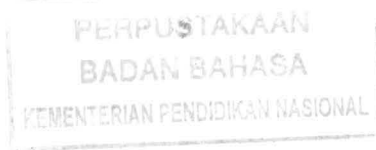
Kajian pada Naskah Pidato  
Pejabat Pemerintah DIY

17  
R



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
PUSAT BAHASA  
**BALAI BAHASA YOGYAKARTA**

LARAS PIDATO DALAM  
BAHASA INDONESIA  
KAJIAN PADA NASKAH PIDATO  
PEJABAT PEMERINTAH DIY



WIWIN ERNI SITI NURLINA  
HERAWATI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
PUSAT BAHASA  
BALAI BAHASA YOGYAKARTA

**LARAS PIDATO DALAM BAHASA INDONESIA**  
**Kajian pada Naskah Pidato Pejabat Pemerintah DIY**  
Wiwin Erni Siti Nurlina  
Herawati

**Penyunting:**

Syamsul Arifin

Dhanu Priyo Prabowo

Riani

| PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasifikasi</b><br>PB<br>499.217<br>NUR<br>e | <b>No. Induk :</b> 130<br><b>Tgl. :</b> 28-3-2011<br><b>Ttd. :</b> |

Cetakan Pertama:

November 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kementerian Pendidikan Nasional  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
BALAI PENELITIAN BAHASA  
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34  
YOGYAKARTA 55224 (0274) 562070

**Katalog Dalam Terbitan**

Laras Pidato dalam Bahasa Indonesia; Kajian pada Naskah Pidato Pejabat Pemerintah DIY/ Wiwin Erni Siti Nurlina, Herawati —cet. I—Yogyakarta: Penerbit Balai Bahasa Yogyakarta,

x + 124 hlm; 14.5 x 21 cm, 2010

ISBN 978-979-185-258-6

I. Literatur

II. Syamsul Arifin

I. Judul

800

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PRAKATA**

## **KEPALA BALAI BAHASA YOGYAKARTA**

Tugas Balai Bahasa Yogyakarta antara lain adalah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penelitian dan pengembangan itu secara rutin terus dilakukan dan hingga sekarang sebagian besar hasilnya telah diterbitkan dan dipublikasikan ke masyarakat. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan, sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan program pembangunan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Yogyakarta adalah suatu lembaga yang mengemban amanat rakyat sehingga ada kewajiban untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Oleh sebab itu, sudah semestinya Balai Bahasa Yogyakarta berusaha menyuguhkan hasil kerjanya kepada rakyat (masyarakat) dan salah satu wujudnya adalah terbitan (buku) ini.

Balai Bahasa Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada khalayak (pembaca) yang telah berkenan dan bersedia membaca dan memanfaatkan buku ini. Walaupun buku ini menyuguhkan disiplin ilmu yang khusus, yakni khusus mengenai kebahasaan dan kesastraan, sesungguhnya tidak menutup kemungkinan untuk dibaca oleh khalayak umum karena bahasa dan sastra sebenarnya merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia. Dikatakan demikian, karena setiap hari kita tidak pernah dapat melepaskan diri dari bahasa, baik untuk berbicara atau menulis, untuk membaca atau mendengarkan, dan setiap hari pula kita juga tidak dapat melepaskan diri dari seni (sastra) karena sesungguhnya kehidupan ini sendiri adalah seni. Karena itu, buku berjudul *Laras Pidato*



*dalam Bahasa Indonesia; Kajian pada Naskah Pidato Pejabat Pemerintah DIY* ini dapat dan layak dibaca oleh siapa saja.

Ucapan terima kasih pantas kami sampaikan pula kepada para penulis kebahasaan (Edi Setiyanto, Sumadi, Wiwin Erni Siti Nurlina, Herawati, dan Syamsul Arifin), penilai (Dr. Wedhawati), penyunting (Syamsul Arifin, Danu Pria Prabowa, Riani) dan pengelola penerbitan (Syamsul Arifin dan Dhanu Priya Prabowo), sehingga buku ini dapat hadir di hadapan khalayak pembaca. Semoga amal jasa baik mereka memperoleh imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami berharap semoga buku ini bermanfaat.

**Drs. Tirta Suwondo, M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Buku-buku yang membahas masalah pidato telah banyak yang diterbitkan dan beredar di tengah masyarakat. Dalam berbagai buku itu, uraian tentang pidato lebih ditekankan pada petunjuk atau pedoman pengembangan kemampuan berbicara, yaitu petunjuk berbicara dengan baik, teknik mempersiapkan pidato, dan strategi atau kiat-kiat sukses berpidato. Pembicaraan dalam buku-buku yang telah ada itu lebih menekankan pada aspek bahasa lisannya karena pidato pada hakikatnya memang salah satu perwujudan berbahasa secara lisan. Selain itu, pembicaraan pidato dalam buku-buku yang telah ada lebih bersifat deduktif-normatif, yaitu petunjuk umum atau norma-norma tentang pidato.

Berbeda dengan buku-buku yang telah ada itu, buku ini memaparkan hasil penelitian tentang laras pidato dalam bahasa Indonesia. Pembahasan difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia dalam naskah pidato pejabat pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi buku ini merupakan hasil penelitian yang bersifat induktif tentang pidato, yaitu hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data-data konkret naskah pidato para pejabat di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil kajian terhadap aspek bahasa tulis pidato ini amat diperlukan dalam pengembangan ilmu berbicara atau retorika karena naskah pidato menjadi dasar pelaksanaan pidato yang lisan itu.

Buku ini berisi perian yang representatif tentang pemakaian bahasa Indonesia pada naskah pidato. Cakupan perian tersebut adalah struktur naskah pidato dan kekhasan ungkapan setiap bagian naskah pidato. Uraian dalam buku ini memberikan

gambaran tentang ciri-ciri laras pidato dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri laras pidato dapat dijadikan pijakan dalam menentukan aspek-aspek pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah dalam membuat naskah pidato yang benar.

Penelitian tentang naskah pidato masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan rintisan bagi penelitian tentang laras pidato dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian yang dipaparkan dalam buku ini juga dapat menjadi pemicu bagi para peneliti bahasa untuk melakukan penelitian laras pidato dalam bahasa Indonesia pada lingkup yang lebih luas. Selain itu, temuan penelitian yang diuraikan dalam buku ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang karakteristik penggunaan bahasa Indonesia dalam naskah pidato.

**Penulis**

# DAFTAR ISI

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| PRAKATA KEPALA BALAI BAHASA YOGYAKARTA | iii |
| KATA PENGANTAR                         | v   |
| DAFTAR ISI                             | vii |
| DAFTAR TABEL                           | ix  |

## BAB I

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>PENDAHULUAN</b>                              | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang                              | 1        |
| 1.2 Permasalahan                                | 3        |
| 1.3 Tujuan Penelitian dan Hasil yang Diharapkan | 4        |
| 1.4 Tinjauan Pustaka                            | 4        |
| 1.5 Landasan Teori                              | 5        |
| 1.5.1 Pengertian Naskah Pidato                  | 5        |
| 1.5.2 Struktur Wacana                           | 6        |
| 1.5.3 Kekhasan Ungkapan atau Register           | 7        |
| 1.6 Metode dan Teknik                           | 8        |
| 1.7 Data dan Sumber Data                        | 9        |
| 1.8 Sistematika Penyajian                       | 10       |

## BAB II

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>STRUKTUR TEKS PIDATO</b>                                         | <b>11</b> |
| 2.0 Pengantar                                                       | 11        |
| 2.1 Bagian Awal Teks Pidato                                         | 13        |
| 2.1.1 Bagian Awal Teks Pidato yang Berstruktur Salam Fatis + Sapaan | 13        |
| 2.2.2 Bagian Awal Teks Pidato yang Berstruktur Sapaan + Salam Fatis | 16        |
| 2.2 Bagian Tubuh Wacana Pidato                                      | 17        |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 2.2.1 Bagian Pembuka                            | 17         |
| 2.2.2 Bagian Isi                                | 29         |
| 2.2.3 Bagian Penutup                            | 63         |
| 2.3 Bagian Akhir                                | 69         |
| 2.4 Rangkuman Struktur dan Fungsi Wacana Pidato | 70         |
| <b>BAB III</b>                                  |            |
| <b>PENUTUP</b>                                  | <b>73</b>  |
| 3.1 Simpulan                                    | 73         |
| 3.2 Problematik dan Saran                       | 75         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                           | <b>77</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                 | <b>79</b>  |
| <b>BIODATA</b>                                  | <b>123</b> |

## DAFTAR TABEL

|         |                                                |    |
|---------|------------------------------------------------|----|
| TABEL 1 | Unsur Wacana Pidato secara Umum                | 11 |
| TABEL 2 | Bagian Teks Pidato                             | 12 |
| TABEL 3 | Bagian Teks Pidato secara Ringkas              | 13 |
| TABEL 4 | Rangkuman Struktur dan Fungsi<br>Wacana Pidato | 71 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan ini berisi paparan hasil penelitian tentang penggunaan bahasa Indonesia pada naskah pidato pejabat pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimaksud naskah pidato pejabat pemerintah adalah naskah yang disusun dengan tujuan untuk dibacakan oleh pejabat pemerintah pada acara yang bersifat resmi. Dalam hal ini naskah pidato merupakan sarana komunikasi yang amat penting antara pemerintah (yang diwakili oleh pejabat) dengan masyarakat (publik, partisipan, peserta, hadirin, atau pihak-pihak yang berkepentingan). Hal yang dikomunikasikan tentu bermacam-macam tergantung dari peristiwanya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka maksud pidato juga bermacam-macam, misalnya pengarahan, sambutan pembukaan, amanat, peresmian, penyampaian mandat, dan sebagainya.

Dalam naskah pidato itu, peranan bahasa Indonesia tidak dapat ditinggalkan. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam naskah pidato sangat menentukan keberhasilan penyampaian maksud pemerintah kepada masyarakat. Hal ini disebabkan bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengungkapkan maksud yang disampaikan melalui naskah pidato itu. Inilah alasan mendasar mengapa penggunaan bahasa Indonesia pada naskah pidato pejabat pemerintah dijadikan objek sasaran penelitian ini.

Pidato yang disampaikan oleh pejabat pemerintah pada acara tertentu merupakan peristiwa komunikasi resmi. Sesuai

dengan situasi komunikasi yang resmi, idealnya penggunaan bahasanya juga resmi, yaitu bahasa yang formal. Apakah penggunaan bahasa Indonesia pada naskah-naskah pidato yang dijadikan objek penelitian ini juga merupakan bahasa Indonesia yang resmi? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penelitian secara induktif terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada naskah-naskah pidato. Penelitian yang demikian, berdasarkan pengamatan tim peneliti ini, ternyata belum pernah dilakukan, khususnya penelitian terhadap naskah-naskah pidato di Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai naskah pidato yang akan dibacakan oleh pejabat pemerintah dalam acara resmi, tentu naskah pidato disusun dengan struktur tertentu. Bagaimana struktur naskah pidato yang ada di Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Pertanyaan tersebut juga hanya bisa dijawab melalui penelitian secara induktif terhadap naskah-naskah pidato. Melalui penelitian secara induktif, dapat diungkap bagian-bagian naskah-pidato beserta urutannya. Apakah bagian-bagian naskah pidato beserta urutannya itu sudah logis dan menarik?

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah setiap bagian naskah pidato ditandai oleh kekhasan ungkapan. Ungkapan-ungkapan yang khas digunakan pada setiap bagian naskah pidato: bagian awal, bagian tubuh, dan bagian akhir. Bagaimana ungkapan-ungkapan yang khas itu digunakan dalam naskah pidato? Apakah ungkapan-ungkapan yang khas yang terdapat pada setiap bagian naskah pidato sudah memperhatikan asas komunikatif, keresmian, dan kesopanan?

Penelitian terhadap pemakaian bahasa Indonesia pada naskah-naskah pidato pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan karena hasilnya memberikan manfaat bagi upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini berupa deskripsi struktur dan kekhasan ungkapan pada setiap bagian naskah pidato. Deskripsi tersebut dapat

digunakan sebagai dasar penentuan prioritas materi pembinaan bahasa Indonesia bagi pegawai atau aparat pemerintah yang bertugas menyusun pidato para pejabat. Di samping itu, deskripsi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk menciptakan sandi-sandi bahasa yang khas dan tepat digunakan dalam naskah pidato para pejabat.

Di samping bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, hasil penelitian ini juga memberikan sumbangan bagi pengembangan teori wacana dan sosiolinguistik. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang struktur wacana pidato pejabat pemerintah. Gambaran tersebut dapat memberikan masukan bagi penyusunan teori struktur wacana yang lebih umum sebab teori yang kuat adalah teori yang disusun secara induktif. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang ciri-ciri khas penggunaan bahasa Indonesia pada naskah pidato atau lazim dinamai laras pidato. Laras pidato itu juga disusun secara induktif, yaitu berdasarkan data-data yang berupa naskah pidato para pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan pengembangan teori sosiolinguistik di Indonesia, khususnya pengembangan teori laras bahasa yang lebih luas.

## **1.2 Permasalahan**

Masalah pokok yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada naskah pidato para pejabat di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Bagaimana struktur naskah pidato para pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana kekhasan ungkapan yang terdapat pada setiap bagian naskah pidato para pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Hasil yang Diharapkan**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri laras pidato. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Memerikan struktur naskah pidato para pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memerikan kekhasan ungkapan pada setiap bagian naskah pidato para pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemerian yang representatif tentang pemakaian bahasa Indonesia pada naskah pidato. Pemerian tersebut mencakup struktur naskah pidato dan kekhasan ungkapan setiap bagian naskah pidato. Pemerian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ciri-ciri laras pidato, khususnya pidato para pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan gambaran itu, selanjutnya dapat ditentukan prioritas materi untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah dalam membuat naskah pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Telah banyak pustaka yang membahas pidato. Pustaka-pustaka itu antara lain pustaka karya Keraf (1997), Hendrikus (1991), Ehrlich (1985), Rakhmat (2001), dan Wiyanto (2001). Dalam berbagai pustaka itu pidato dimasukkan sebagai objek kajian retorika, yaitu ilmu berbicara. Karena sebagai objek kajian ilmu berbicara, pembicaraan tentang pidato dalam pustaka-pustaka tersebut lebih menekankan pada petunjuk atau pedoman pengembangan kemampuan berbicara, yaitu petunjuk berbicara dengan baik, teknik mempersiapkan pidato, dan strategi melaksanakan pidato. Pembahasan pidato dalam pustaka-pustaka tersebut lebih bersifat deduktif-normatif, yakni petunjuk umum atau norma-norma pidato.

Pembahasan pidato yang bersifat induktif, yang berdasarkan data-data konkret berbagai peristiwa pidato, masih jarang dilakukan. Pembahasan pidato dalam pustaka-pustaka yang telah ada juga lebih menekankan pada aspek bahasa lisannya. Memang seharusnya begitu karena inti pidato adalah penggunaan bahasa lisan. Namun, aspek bahasa tulis juga perlu dikaji karena naskah pidato merupakan dasar pelaksanaan pidato yang lisan itu. Selain itu, dalam pustaka-pustaka yang ada pembahasan aspek bahasa yang merupakan aspek esensial dalam pidato masih diabaikan.

Berdasarkan telaah pustaka-pustaka tentang pidato itu, amatlah beralasan apabila fokus penelitian ini diarahkan pada aspek bahasa tulis pidato atau naskah pidato. Yang lebih ditekankan adalah kajian terhadap penggunaan bahasanya. Di samping itu, kajian ini berbeda dengan pembahasan yang telah ada. Kajian ini lebih bersifat induktif, yaitu berdasarkan data-data konkret yang berupa naskah-naskah pidato yang dibacakan oleh pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.5 Landasan Teori**

Pada bagian ini diuraikan teori yang berupa konsep-konsep yang digunakan sebagai pijakan pemikiran untuk menyelesaikan persoalan penelitian tentang pemakaian bahasa Indonesia dalam naskah pidato pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori itu meliputi pengertian naskah pidato, struktur wacana, dan kekhasan ungkapan atau register.

### **1.5.1 Pengertian Naskah Pidato**

Pidato adalah berbicara dengan publik (*public speaking*, *oral communication*, dan *speech communication*). Dalam hal ini pidato adalah wujud pemakaian bahasa lisan untuk berkomunikasi searah dengan khalayak. Jadi, pidato adalah penyajian lisan.

Menurut Rakhmat (2001: 17-19), berdasarkan cara mempersiapkannya, pidato dapat dibedakan menjadi empat jenis,

yaitu *impromptu*, *manuskrip*, *memoriter*, dan *ekstempore*. *Impromptu* adalah pidato yang dilakukan secara spontan. Pidato ini dilakukan tanpa persiapan. Misalnya, dalam suatu acara pesta ulang tahun seseorang ada seorang tokoh masyarakat yang secara spontan diminta memberikan sambutan. *Manuskrip* adalah pidato dengan naskah. Juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. *Memoriter* adalah pesan pidato yang ditulis kemudian diingat kata demi kata. *Memoriter* memungkinkan adanya ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana, pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. *Ekstempore* adalah pidato yang dilakukan berdasarkan garis besar atau *outline*.

Berdasarkan uraian jenis-jenis pidato itu, lalu apa yang dimaksud dengan naskah pidato yang menjadi objek sasaran penelitian ini? Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan naskah pidato dalam penelitian ini adalah naskah persiapan jenis pidato *manuskrip*. Dalam hal ini naskah pidato adalah naskah yang dibaca oleh para pejabat pemerintah pada acara-acara resmi.

### **1.5.2 Struktur Wacana**

Struktur wacana berkaitan dengan susunan bagian-bagian wacana sebagai kesatuan yang utuh. Ada struktur yang berlaku untuk seluruh jenis wacana dan ada struktur yang berlaku untuk jenis wacana tertentu. Struktur wacana yang berlaku umum digunakan untuk menggambarkan penataan bagian-bagian semua jenis wacana, sedangkan struktur yang khusus dipakai untuk menguraikan kekhasan bagian-bagian wacana tertentu.

Dalam studi ini kedua pengertian struktur tersebut diterapkan sekaligus untuk menggambarkan struktur naskah pidato. Pertama-tama digunakan teori struktur wacana yang umum. Menurut Luxemburg (1984: 100), wacana dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal wacana (*exordium*), bagian tubuh wacana (*narration*, *confirmatio*, atau *argumentatio*), dan bagian penutup (*peroratio*). Menurut Baryadi (2002: 14), sebagai sebuah struktur, setiap bagian wacana itu memiliki

fungsi tersendiri. Bagian awal berfungsi sebagai pembuka wacana, bagian tubuh berfungsi sebagai pemapar isi wacana, dan bagian penutup berfungsi sebagai penanda akhir wacana.

Naskah pidato pertama-tama diurai menjadi tiga bagian tersebut. Setelah itu, setiap bagian diurai lagi menjadi subbagian yang lebih kecil lagi. Subbagian yang lebih kecil lagi itu diberi nama sesuai dengan fungsinya dalam naskah pidato. Subbagian yang lebih kecil ini diharapkan dapat menggambarkan struktur wacana yang berlaku khusus pada naskah pidato. Dengan demikian, ciri-ciri khusus struktur wacana pidato dapat diungkapkan.

### 1.5.3 Kekhasan Ungkapan atau Register

Kekhasan ungkapan pada suatu bidang atau wacana disebut register. Halliday dan Hasan (1985: 38-39) merumuskan pengertian register sebagai berikut.

*"In order to incorporate this into our general theory, we need the concept of a variety of language, corresponding to a variety of situation: a concept of the kinds of variation in language that goes with variation in this context of situation. This therefore is the point at which we need to bring in the notion of a **register**".*

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa register merupakan ragam bahasa yang menggambarkan variasi sistematis penggunaan bahasa yang ditentukan oleh konteks situasi.

Selanjutnya, Halliday dan Hasan menjelaskan bahwa register adalah konsep semantis yang dapat dimengerti sebagai konfigurasi makna yang dipengaruhi oleh konfigurasi konteks situasi yang mencakup bidang (*field*), sarana (*mode*), dan partisipan (*tenor*). Terkait dengan objek penelitian ini, yang dimaksud dengan bidang adalah konteks situasi yang berkenaan dengan acara seremonial yang berupa pidato; sarana berkenaan dengan komunikasi tertulis yang berupa naskah pidato yang akan diba-

cakan secara lisan; partisipan berkaitan dengan pihak yang akan membacakan pidato dan pihak yang akan mendengarkan pidato. Ketiga ranah konteks situasi tersebut menentukan kekhasan ungkapan pada setiap bagian naskah pidato.

Sebagai konsep semantik, register terwujud dalam berbagai bentuk satuan lingual seperti bunyi, silabel, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, atau penggalan wacana. Ciri-ciri register dapat dilihat dari kekhasan satuan lingualnya seperti kekhasan bunyi, kosa kata, bentuk kata, dan kalimat. Sebagai contoh ungkapan *Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*, *salam sejahtera*, dan *Yang terhormat Bapak Gubernur DIY* dapat menjadi kekhasan laras pidato.

## 1.6 Metode dan Teknik

Ada tiga langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data (Sudaryanto 1988: 57). Setiap langkah penelitian itu dilaksanakan dengan metode dan teknik tertentu. Dalam pengumpulan data dilakukan pengumpulan data yang berupa penggunaan bahasa Indonesia pada naskah pidato yang dibacakan oleh para pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengamati sumber data (Nawawi 1990: 100-101). Dalam hal ini yang diamati adalah berbagai naskah pidato di Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode observasi tersebut diterapkan dengan teknik catat, yakni mencatat data pada kartu data (Sudaryanto 1988a: 9). Yang dicatat adalah penggunaan bahasa Indonesia pada naskah pidato yang dibacakan oleh para pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah data terkumpul, data diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah.

Data yang sudah terklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode distribusional (Sudaryanto 1993: 15). Metode distribusional menggunakan unsur bahasa sebagai alat penentu



dalam pembuktiannya. Metode ini digunakan untuk membuktikan struktur naskah pidato dan kekhasan ungkapan yang digunakan dalam setiap bagian naskah pidato. Metode distribusional dalam penelitian ini diterapkan dengan teknik dasar yang disebut “teknik bagi unsur langsung” (BUL) (Sudaryanto, 1993: 31-35), yaitu naskah pidato diurai menurut bagian-bagiannya sesuai dengan kerangka teori yang telah dikemukakan pada bagian 1.5. Teknik BUL itu selanjutnya diterapkan dengan teknik lanjutan yang disebut “teknik baca markah” (Sudaryanto 1993: 95-98), yaitu setiap bagian naskah pidato diidentifikasi kekhasan ungkapannya sesuai dengan penanda lingual.

Hasil analisis data yang berupa pemerian struktur dan kekhasan ungkapan naskah pidato disajikan dengan metode informal dan metode formal (Sudaryanto 1993: 145-146). Dengan metode informal, hasil analisis data yang berupa struktur dan kekhasan ungkapan pada naskah pidato dipaparkan dengan kata-kata biasa. Dengan metode formal, hasil analisis data yang berupa struktur naskah pidato digambarkan melalui bagan sehingga mudah dilihat atau dibaca.

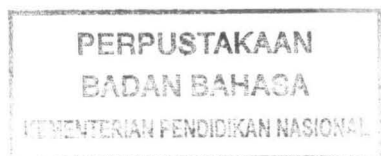
## **1.7 Data dan Sumber Data**

Sebagaimana dirumuskan oleh Sudaryanto (1990: 14), data kebahasaan adalah objek penelitian dan konteksnya. Objek penelitian ini adalah pemakaian bahasa Indonesia dalam naskah pidato. Berdasarkan rumus tersebut, data dalam penelitian ini harus lebih luas dari objek penelitiannya, yaitu naskah atau teks pidato. Adapun sumber datanya ialah koleksi naskah pidato yang dibacakan oleh para pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2000-2005. Selain itu, ada sebuah teks pidato Mendiknas yang digunakan sebagai pembandingan konstruksi pada teks yang bertingkat nasional.

Di samping itu, ada dua buah data pendamping, yaitu pidato yang diperoleh bukan dari instansi, melainkan diambil dari pidato pemuka masyarakat tingkat RT dan RW. Data itu ialah pidato pada pertemuan acara aqiqah dan peringatan Hari Kemerdekaan. Data itu digunakan untuk menunjukkan bahwa bagian pembuka dan penutup harus ada.

## **1.8 Sistematika Penyajian**

Laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bab. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan dan hasil yang diharapkan, landasan teori, metode dan teknik, data dan sumber data, dan sistematika penyajian laporan. Bab II berisi hasil penelitian. Bab ini menguraikan struktur teks pidato dan kekhasan ungkapan setiap bagian teks pidato. Dalam pemaparannya, kedua hal tersebut dipadukan sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang laras pidato. Kemudian laporan ini diakhiri dengan kesimpulan mengenai laras pidato dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

# **STRUKTUR TEKS PIDATO**

### **2.0 Pengantar**

Wacana pidato yang berwujud sebuah teks memiliki beberapa unsur atau bagian. Bagian-bagian itu tersusun dan membentuk sebuah konstruksi atau bangunan. Konstruksi itu terlihat sebagai sebuah struktur, yaitu struktur teks pidato. Secara garis besar, sebuah teks pidato memiliki tiga pokok bagian, yaitu (a) bagian awal, (b) bagian tubuh, dan (c) bagian akhir, yang dapat digambarkan dalam bagan berikut.

**TABEL 1 Unsur Wacana Pidato secara Umum**

| <b>WACANA PIDATO</b> |               |
|----------------------|---------------|
| <b>NO</b>            | <b>BAGIAN</b> |
| 1                    | Bagian Awal   |
| 2                    | Bagian Tubuh  |
| 3                    | Bagian Akhir  |

Masing-masing bagian pada wacana pidato memiliki subbagian. Bagian awal terbagi menjadi: (a) sapaan dan (b) salam (fatis) pembuka. Bagian tubuh terbagi menjadi: (a) bagian pembuka, (b) bagian isi, dan (c) bagian penutup. Bagian akhir terbagi menjadi (a) salam penutup dan (b) tertanda.

Agar lebih jelas, struktur wacana/teks pidato digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

## BAGAN 1 Struktur Wacana Pidato



Apabila digambarkan di dalam tabel, struktur teks pidato akan terlihat sebagai berikut.

**TABEL 2 Bagian Teks Pidato**

| NO | BAGIAN | SUBBAGIAN                                                                 |                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | AWAL   | (1) Sapaan                                                                |                |
|    |        | (2) Salam (fatis) Pembuka                                                 |                |
| 2  | TUBUH  | (1) Pembuka                                                               |                |
|    |        | (2) Isi                                                                   | (a) Informatif |
|    |        |                                                                           | (b) Persuasif  |
|    |        |                                                                           | (c) Rekreatif  |
|    |        | (3) Penutup                                                               |                |
| 3  | AKHIR  | (1) Tertanda (nama, jabatan, tanda tangan, kota beserta tanggal, dan cap) |                |

Struktur tersebut dapat juga digambarkan urutannya secara ringkas seperti di bawah ini.

**TABEL 3 Bagian Teks Pidato secara Ringkas**

| No. | BAGIAN             |
|-----|--------------------|
| 1   | Sapaan             |
| 2   | Salam Pembuka      |
| 3   | (paragraf) Pembuka |
| 4   | (paragraf) Isi     |
| 5   | (paragraf) Penutup |
| 6   | Tertanda           |

## **2.1 Bagian Awal Teks Pidato**

Sesuai dengan namanya, bagian awal teks pidato terletak di awal atau depan naskah pidato. Sebagai wacana tertulis yang akan dilisankan atau dibacakan, bagian-bagian naskah pidato disesuaikan dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan lazimnya didahului dengan perbuatan pembicara menjalin kontak atau menyapa pembicara. Demikian pula bagian awal naskah pidato ini berfungsi untuk menjalin kontak dengan mitra bicara.

Bagian awal teks pidato dibangun oleh dua unsur, yaitu salam fatis dan sapaan. Berdasarkan urutan unsur-unsurnya, bagian awal teks pidato dapat dibedakan menjadi dua pola, yaitu (i) salam fatis + sapaan dan (ii) sapaan + salam fatis.

### **2.1.1 Bagian Awal Teks Pidato yang Berstruktur Salam Fatis + Sapaan**

Bagian awal teks pidato ini terdiri dari salam fatis diikuti sapaan. Salam fatis yang digunakan ialah salam fatis untuk membuka komunikasi seperti *Assalamu'alaikum Wr.Wb.* dan *salam sejahtera*. Sapaan yang digunakan adalah nama jabatan pemerintahan baik sipil maupun militer, seperti *Gubernur, Mus-pida, Ketua DPRD Propinsi DIY, Ketua Pengadilan Tinggi*, dan sebagainya. Nama jabatan itu biasanya didahului oleh penanda honorifik seperti *Yang terhormat* atau *Yang kami hormati* dan sapaan kekerabatan *Bapak atau Ibu*. Dengan demikian, rumus struktur bagian awal teks pidato adalah **salam fatis + penanda**

**honorifik + sapaan kekerabatan + nama jabatan.** Urutan unsur-unsur tersebut didasarkan pada derajat jabatan, dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah. Berikut ini contohnya.

- (1) *Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
*Yang terhormat Bapak Gubernur DIY*  
*Yang kami hormati Bapak Muspida*  
*Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Propinsi DIY*  
*Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi*  
*Yang kami hormati Dan Lanud, Dan Lanal Propinsi DIY*  
*Yang kami hormati Bapak Bupati/Walikota Se DIY*  
*Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas/Badan*  
*baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota*  
*Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi*  
*Yang kami hormati Mitra Kerja baik dari Perbankan*  
*Organisasi Profesi dan LSOM*
- (2) *Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
*Salam sejahtera bagi kita semua,*  
*Hadirin sekalian Yth.*
- (3) *Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*  
*Salam sejahtera bagi kita semua*  
*Hadirin dan Saudara-saudara yang saya hormati*
- (4) *Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*  
*Salam sejahtera bagi kita sekalian.*
- (5) **ASSALAMU'ALAIKUM WR WB**  
**SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA**  
**SEMUA**  
**YANG TERHORMAT**
  1. **BAPAK MENTERI DALAM NEGERI YANG DI-**  
**WAKILI OLEH DIERJEN PEMERINTAHAN**  
**UMUM BAPAK DRS PROGO NURJAMAN**
  2. **BAPAK KEPALA BAPPENAS ATAU YANG ME-**  
**WAKILI**

3. *BAPAK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM HAL INI WAKIL KEPALA BPN, PROF. DR. MARIA SUMARJONO SH., MCL, MPA*
  4. *BAPAK DIRJEN ANGGARAN DEP. KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIWAKILI OLEH KEPALA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA BAPAK DR. MULIA NASUTION*
  5. *BAPAK GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*
  6. *BAPAK REKTOR UGM PROF. DR. SOFIAN EFFENDI*
  7. *SAUDARA PARA WALIKOTA ANGGOTA KOMWIL III APEKSI BESERTA JAJARANNYA*
  8. *SAUDARA KETUA DEWAN PENGURUS DAN DIREKTUR EKSEKUTIF APEKSI*
  9. *PARA TAMU UNDANGAN PESERTA RAKER YANG BERBAHAGIA*
- (6) *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
*Salam sejahtera bagi kita semua*
- Yth. Dewan Pengurus APEKSI dan hadirin sekalian yang kami hormati.*  
*Yang berbahagia,*
- (7) *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
*Salam sejahtera bagi kita semua*
- Yang Kami Hormati,*  
*Bapak Ketua Yayasan Cakra Kinarya Bangsa Jakarta*  
*Bapak Kepala Pusat Studi Kependudukan UGM Yogyakarta*  
*Bapak Kepala Bappeda Prop DIY*  
*Bapak Kepala BKKBN Prop. DIY.*  
*Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo*  
*Sdr. Kepala Dinas Instansi terkait Kab. Kulon Progo*

*Sdr. Unsur Muspika Kecamatan Kokap  
Bapak/Ibu Tamu Undangan  
Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia*

- (8) *Assalamualaikum Wr. Wb  
Salam sejahtera bagi kita sekalian*

*Yang Kami Hormati,  
Bapak Kepala Balai Bahasa Yogyakarta  
Sdr. Sdr. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kulon Progo  
Bapak—Ibu Tamu Undangan dan para tutor  
Hadirin peserta pelatihan*

### **2.2.2 Bagian Awal Teks Pidato yang Berstruktur Sapaan + Salam Fatis**

Kebalikan dari pola 2.2.1, pola ini terdiri dari sapaan diikuti salam fatis. Sapaan yang dimaksud juga berjenis sapaan nama jabatan pemerintahan. Sapaan ini lazimnya didahului dengan penanda honorifik seperti *yang terhormat, yang mulia, yang berbahagia* dan nama kekerabatan seperti *saudara, bapak, dan sebagainya*. Adapun salam fatisnya sama dengan pola pertama, yaitu *Assalamu 'alaikum warakhmatullohi wabarokaatuh dan salam sejahtera*. Dengan demikian, rumusan yang lengkap dari bagian awal teks pidato yang berstruktur **sapaan + salam fatis adalah penanda honorifik + nama kekerabatan + nama jabatan + salam fatis**. Berikut ini contohnya.

- (9) *Yth. Sdr. Gubernur DI Yogyakarta  
Yth. Sdr. Para Walikota  
Yth. Sdr. Direktur Eksekutif beserta jajaran Pengurus  
APEKSI  
Yth. Sdr. Para Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah  
Para undangan dan hadirin yang berbahagia.*



*Assalamu 'alaikum warokhmatullohi wabarokaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua*

- (10) *Yang terhormat Wakil Presiden RI yang diwakili  
Bapak Yusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan  
Rakyat  
Sekretaris Jenderal MPR dan DPR  
Yang mulia para duta besar negara sahabat,  
Yang berbahagia para pecinta bahasa Indonesia,  
Assalamualaikum wr. wb.  
Salam berbahagia bagi kita semua,*

## **2.2 Bagian Tubuh Wacana Pidato**

Bagian tubuh merupakan bagian yang berisi pokok-pokok pidato. Bagian ini terbagi menjadi (a) bagian pembuka, (b) bagian isi, dan (c) bagian penutup. Masing-masing bagian terisi atau berwujud paragraf –paragraf.

### **2.2.1 Bagian Pembuka**

Bagian pembuka laras pidato merupakan bagian pengantar untuk menyampaikan isi pidato. Dalam bagian ini perlu diemukakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dibicarakan. Bagian pembuka sifatnya sebagai pengantar terletak sebelum uraian isi pidato. Bagian pembuka paling sedikit satu kalimat atau dapat beberapa kalimat, yaitu satu paragraf atau lebih. Ada beberapa jenis bagian pembuka laras pidato berdasarkan isinya. Pada subbab berikut ini akan dibicarakan berbagai jenis bagian pembukaan laras pidato.

Bagian pembuka laras pidato berdasarkan isinya dapat dipilah menjadi enam macam seperti berikut.

#### **1) Puji Syukur**

Dalam bagian pembuka laras pidato pada umumnya diawali dengan ucapan *puji syukur* sebelum menyampaikan isi pokok pidato. Pengucapan *puji syukur* dimaksudkan supaya pe-

laksanaan suatu kegiatan dilindungi oleh Tuhan YME. Seperti terlihat pada contoh berikut ini.

- (11) ***Puji syukur** senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di sini keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat Penelaahan program KB Nasional tahun 2003 (Sambutan Gubernur DIY)*

Selain ucapan *puji syukur*, ditemukan pula contoh lain pada bagian pembuka laras pidato yang sering disisipi oleh ucapan *selamat datang* dan dengan ucapan *terima kasih* kepada para undangan atau hadirin. Biasanya pada akhir bagian pembuka disisipi pula suatu harapan dengan ditandai kata *mudah-mudahan* agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan lancar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh (12) bagian pembuka berupa satu paragraf seperti berikut.

- (12) ***Puji syukur** senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenan-Nya sehingga kita masih mendapat kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2003. Atas nama pemerintah Kota Yogyakarta menghaturkan **selamat datang** dan **terima kasih** atas kehormatan dan kepercayaan, kota Yogyakarta sebagai penyelenggara kegiatan yang strategis ini. **Mudah-mudahan** suasana Yogyakarta semakin memberikan pencerahan bagi berlangsungnya pertemuan ini (Sambutan Walikota Yogyakarta)*

Contoh lain yang setipe dengan contoh (12) di atas adalah seperti berikut.

- (13) *Kita mengucapkan **puji syukur Alhamdulillah** kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Esa, Allah SWT yang telah memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita*

*semua sehingga kita dapat berkumpul. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri Rapat kerja Komwil III Apeksi tahun 2003 yang diselenggarakan di kota Perjuangan Yogyakarta. Untuk itu selaku ketua Komwil III Apeksi dengan penuh ketulusan mengucapkan **terima kasih** dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Walikota Yogyakarta serta jajarannya yang telah menyiapkan dan melaksanakan Rapat Kerja Komwil III Apeksi ini dengan baik. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini tak lupa mengucapkan **selamat** dengan dilantiknya beberapa walikota yang baru antara lain walikota Sukabumi, walikota Cirebon dan, walikota Tasikmalaya. Di samping itu, pada kesempatan ini komwil III Apeksi menyambut dengan rasa syukur dengan bercabangnya kota Banjar, Provinsi Jawa Barat sebagai anggota baru Komwil III Apeksi. Dengan demikian jumlah anggota dari 222 bertambah menjadi 23 kota. Sebagai ketua Komwil saya berharap bahwa beberapa daerah yang sudah melakukan ciri urban dan dinamika perkotaannya untuk bisa direalisasikan menjadi pemerintah kota*

*(Sambutan ketua Komwil III Apeksi, 16 Juli 2003)*

Contoh (13) bagian pembuka diawali oleh ucapan *puji syukur Alhamdulillah* sebelum melaksanakan Rapat Kerja Komwil III Apeksi III tahun 2003. Selain itu, bagian pembuka disertai ucapan terima kasih yang disampaikan Ketua Komwil III Apeksi ditujukan kepada Walikota Yogyakarta beserta stafnya dan ucapan *selamat* telah dilantiknya beberapa walikota.

## **2) Ajakan**

Bagian pembuka laras pidato yang berisi suatu ajakan merupakan suatu ajakan orang pertama (orang yang menyampaikan sambutan pidato) kepada orang kedua (dalam hal para tamu undangan atau hadirin) seperti terlihat pada contoh berikut.

- (14) **Marilah** kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan puji syukur kehadiran Tuhan YME atas rahmat dan perkenan-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam Rangka Penutupan Rapat Komwil III Apeksi Tahun 2003.

(Sambutan Walikota Yogyakarta pada Penutupan Rapat Kerja Komisi III Apeksi Tahun 2003)

Bagian pembuka laras pidato yang berisi ajakan sebagaimana dicontohkan di atas ditandai oleh pemakaian kata *marilah*. Contoh lain yang setipe dengan contoh di atas seperti berikut.

- (15) *Hadirin serta para undangan yang berbahagia. Dalam memasuki tahun baru ini **marilah** kita mengoreksi diri kita sendiri masing-masing, sampai di manakah pengabdian kita terhadap Allah Robul'Alamin, berapa banyak kesalahan kita dari awal tahun sampai akhir tahun, sehingga dalam tahun ini kita meningkatkan pengabdian/kebaikan yang selama ini kita perbuat atau mengubah kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan selama setahun ini.*

(Pidato Tahun Baru Masehi)

- (16) *Terlebih dahulu **marilah** kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa pun. Kami merasa berbahagia karena dapat menghadiri Rapat Kerja Komwil III Apeksi di Yogyakarta dan memberikan paparan dengan tema "Kemandirian Pemerintah Kota dalam Otonomi Daerah". Saya menilai rapat kerja ini mempunyai arti penting untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai isu strategis perkantoran yang semakin lama mempunyai permasalahan semakin kompleks sehingga Apeksi se-*

*bagai wadah pemerintah kota harus selalu tanggap dan kreatif dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terpencil, baik pada tataran konseptual maupun tataran implementasi.*

(Paparan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kerja Komwil III Apeksi Tahun 2003)

Contoh (15) dalam bagian pembuka diawali sesuatu ajakan untuk mengoreksi diri kita masing-masing yang telah kita lakukan dalam waktu setahun dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Demikian pula contoh (6) bagian pembuka diawali suatu ajakan untuk meman-jatkan rasa syukur kepada Allah SWT supaya dapat melaksanakan rapat kerja dan untuk menyamakan persepsi berbagai isu strategis perkotaan yang semakin lama mempunyai permasalahan kompleks sehingga dengan rapat ini dapat menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi.

Contoh lain bagian pembuka laras pidato yang setipe dengan contoh diatas, seperti berikut ini.

- (17) ***Marilah** dalam kesempatan yang sangat bahagia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Rabbul’ Jalil karena hanya rahmat-Mu, nikmat dan taufik serta hidayah-Nyalah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat ridha dari Allah SWT, amin. Selamat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beliau dan semua orang yang mau mengikuti semua ajaran beliau.*

(Sambutan Perpisahan Para Pelajar).

### 3) **Ucapan Basmallah: “Bismillaahir Rahmaanir Rahim” dan Ucapan Tahmid: “Alhamdullilah”**

Bagian pembuka laras pidato dapat pula diawali dengan mengucapkan basmallah dan mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan tahmid agar pertemuan yang akan dilaksanakan

mendapat perlindungan dari Tuhan YME. Seperti terlihat pada bagian pembuka laras pidato di bawah ini.

- (18) *Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmallah “**Bismillahir Rahmanir Rahim**” dan patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan tahmid “**Alhamdulillah**.”. Karena kita selalu memperoleh limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini tempat untuk memenuhi undangannya Bapak M. Zaeroni dalam acara memasuki tahun baru, semoga kehadiran para tamu dan saudara sekalian mendapat ridha dari Allah SWT. Selanjutnya kesejahteraan serta keselamatan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan para sahabat beliau serta para pengikut ajaran beliau. Karena lantaran beliau kita bisa membedakan yang hak dan mana yang batil.*

(Sambutan memasuki tahun 2006).

- (19) *Para pelajar baik putra maupun putri yang kami hormati!*

*Untuk mengawali pertemuan pengurus OSIS yang kita selenggarakan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Basmallah: **Bismillahir Rahmanir Rahim**. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan bacaan Tahmid: “**Alhamdulillah**” karena berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga kita bisa bertamu di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. **Semoga** pertemuan kita dalam rangka rapat pengurus osis ini mendapat petunjuk, serta ridha dari Allah, sehingga dapat membuahkan program-program yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tengah kita pelajari. (Pidato Rapat OSIS)*

Contoh (18) bagian pembuka laras pidato di atas diawali dengan mengucapkan basmallah: “Bismillahir Rahmanirahim” dengan maksud pelaksanaan kegiatan tahun baru yang diselenggarakan Bapak M. Zaeroni memperoleh perlindungan dari Allah SWT. Ucapan tahmid: “Alhamdulillah” diucapkan supaya kita memperoleh limpahan rahmat dan nikmatnya. Demikian pula contoh (19) bagian pembuka diawali pula ucapan basmallah dengan maksud pelaksanaan rapat pengurus OSIS dapat berjalan lancar. Puji syukur kepada Allah SWT dipanjatkan dengan bacaan tahmid ditujukan supaya para pengurus OSIS dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, harapan yang terkandung dalam doa adalah permohonan supaya rapat pengurus osis tersebut akan menghasilkan program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Suatu harapan yang akan dicapai pengurus OSIS dalam bagian pembuka ditandai oleh kata *semoga*. Contoh lain yang setipe dengan contoh di atas sebagai berikut.

- (20) *Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, bahwa atas ridho dan limpahan rakmat-Nya kita sekalian dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam acara “Pelatihan Penyusunan Tata Naskah Dinas dalam rangka Pengembangan Model Pengolahan Informasi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo”.*

(Sambutan Bupati Kulon Progo, 29 Juni 2005)

- (21) *Bapak-bapak dan segenap undangan yang kami hormati! Syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa terlimpahkan kepada kita terutama kepada Bapak Agus yang telah mendapat karunia yang amat besar dan sekaligus amanat, yaitu lahirnya seorang putra yang kedua dan diberi nama Amelia. Semoga dengan nama tersebut*

*bisa mendorong jiwanya anak menuju kesempurnaan agama Allah sesuai dengan nama yang diberikannya. Dan, semoga menjadi anak solehkha selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Amin.*

(Pidato Walimah Tasmiyah, 4 Desember 2006)

Contoh (20) dan (21) bagian pembuka diawali ucapan puji syukur dengan dengan mengucapkan tahmid: *Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat.* Selain itu, pada bagian pembuka disertai pula suatu harapan yang ditandai oleh kata *semoga* seperti terlihat pada contoh (21).

#### 4) Bersyukur

Dalam bagian pembuka laras pidato dapat diawali dengan kata *bersyukur* kepada Tuhan YME karena sampai saat dan detik ini masih diberikan badan sehat baik lahir batin. Perhatikan contoh berikut ini bagian pembuka dengan menggunakan kata *bersyukur*.

(22) *Hadirin yang kami hormati!*

*Kita **bersyukur**, karena rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya semata sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang yang telah bersusah payah serta mengorbankan segala apa yang telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah SWT, baik harta benda maupun jiwa raganya untuk mencapai kemerdekaan seperti yang kita nikmati serta kita peringati dan kita pertahankan, jangan sampai berulang lagi ada penjajahan di muka bumi negara yang tercinta ini.*

(Pidato Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 2006)



- (23) *Hadirin dan undangan yang kami hormati*  
*Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini kita **bersyukur** kehadiran Illahi Rabbi karena, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin. Di samping itu kita sekalian senantiasa melimpahkan kecukupan tanpa kekurangan suatu apa pun. Untuk itu sudah semestinya kita bersyukur kepada-Nya. Karena tanpa rahmat, nikmat, dan taufik serta hidayah-Nya kita takkan bisa melaksanakan kegiatan apa pun. Pada siang hari ini kita melaksanakan Halal Bihalal. Sekalipun secara Halal Bihalal itu merupakan tradisi, namun bisa kita rasakan manfaatnya sehingga bisa menciptakan eratny hubungan antarkawan sanak keluarga, antartetangga, sekaligus mempererat ukhuwah Islamiah...*  
(Pidato Acara Halalbihalal 2006)

Contoh (22) dan (23) dalam bagian pembuka diawali oleh kata (kita) *bersyukur* bahwa kita dalam keadaan sehat lahir batin sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan Indonesia dan dapat melaksanakan kegiatan Halalbihalal. Contoh lain yang setipe dengan contoh di atas seperti berikut.

- (24) *Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para undangan yang kami hormati!*  
*Patutlah kita **bersyukur** kehadiran Ilahi Rabbi dengan mengucapkan tahmid, karena hanya dengan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Almunawarah guna bertakbir malam hari Raya Idul Adha. Salawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada penghulu kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat serta para pengikut ajaran-ajaran beliau. Apa sebabnya dalam bulan Dzul Hijjah tepatnya tanggal 9 sampai dengan 13 merupakan hari mulia? Tidak lain, karena pada saat ini kita disyariatkan untuk berpuasa*

*sunat pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzul Hijjah, kemudian disunatkan berkorban (menyembelih binatang).*

*(Pidato Hari Raya Idul Adha, 2005)*

- (25) *Dalam suasana yang sangat cerah ini, kita **bersyukur** kepada Allah SWT dengan mengucapkan Tahmid yang sebanyak-banyaknya, yaitu ucapan Alhamdulillah. Karena dengan rahmat, nikmat, dan taufik serta hidayah-Nya semata, sehingga kita bisa bermuwajjah di Gedung Vendeburg ini untuk memperingati hari bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Apakah yang sebenarnya mendorong kepada kita dianjurkan memperingati hari Sumpah Pemuda? Untuk memperoleh jawabannya, marilah kita simak kembali peristiwa yang berhubungan dengan hari Sumpah Pemuda, sebelum terjadi kesepakatan Sumpah Pemuda, yang tepatnya 28 Oktober 1928 di Jakarta...*

*(Pidato Memperingati Hari Sumpah Pemuda, 2006)*

Demikian pula contoh (24) dan (25) bagian pembuka laras pidato diawali oleh kata (kita) *bersyukur*. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih dapat melaksanakan kegiatan malam takbir Hari Raya Idul Adha dan memperingati Hari Sumpah Pemuda.

## 5) Perkenankan

Bagian pembuka laras pidato dapat diawali dengan ucapan permohonan izin pembicara (yang berpidato) yang ditujukan kepada para undangan atau hadirin. Seperti terlihat pada contoh berikut ini.

- (26) *Bapak-bapak dan hadirin sekalian, khususnya Bapak yang kami hormati! Dalam kesempatan ini yang sangat mengharukan ini, **perkenankan** kami mewakili masyarakat desa kami yang tengah mendapat musibah*

*gempa yang telah banyak memakan korban jiwa dan harta benda dan dengan rasa syukur dan gembira kami saat ini mendapat uluran tangan dari para bapak yang kemungkinan besar sumbangan tersebut berasal para dermawan melalui para bapak. Dan, kami tidak dapat membalas apa-apa hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga amal para bapak dan para dermawan diterima Allah dan sekaligus bisa mengurangi beban penderitaan kami. Dan, kami **mohon bantuan doa** dari bapak-bapak semoga musibah yang kita alami ini secepatnya akan berakhir, sehingga secepatnya kita bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat gempa tersebut.*

(Pidato Saat Gempa Bumi, Mei 2006)

Berdasarkan teks pidato di atas bagian pembuka diawali permohonan izin bahwa si pembicara sebagai wakil masyarakat desa yang mendapat musibah gempa bumi mendapat bantuan dari para dermawan. Permohonan izin dalam pembuka dengan menggunakan kata perkenankan. Selain permohonan izin, pada bagian pembuka terdapat pula permohonan doa yang ditujukan kepada para dermawan agar musibah gempa bumi cepat berakhir dan para korban gempa dapat segera memperbaiki kerusakan-kerusakan rumahnya. Permohonan doa ditandai oleh kata mohon doa.

## 6) Ucapan Terima Kasih

Pada bagian pembuka laras pidato diawali oleh ucapan terima kasih yang ditujukan kepada keluarga yang mempunyai hajat/akikah (Bapak Sumardi). Perhatikan contoh bagian pembuka yang diawali dengan ucapan *terima kasih* seperti berikut.

- (27) *Para tamu undangan yang kami hormati!*  
*Kami sangat **berterima kasih** kepada Bapak Sumardi,*  
*yang mana pada malam hari ini kami diberi kesempatan*

*an untuk mewakili Bapak Sumardi sekeluarga dalam acara walimah akikah atas kelahiran putranya yang pertama yang bernama Adelia dan sekaligus memberikan mau'idha tentang aqiqah. Sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi tugas kami, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada para tamu undangan atas kesediaanya untuk menghadiri undangan kami sekeluarga, semoga dibalas oleh Allah Ta'ala sesuai dengan pengorbanan para tamu undangan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam menyambut kehadiran bapak dan ibu kurang berkenan di hati bapak dan ibu.*

*(Pidato Acara Akikah).*

Dalam bagian pembuka dikemukakan dengan ucapan *terima kasih* disampaikan oleh orang pertama (yang menyampaikan sambutan) yang ditujukan kepada orang mempunyai hajat akikah (Bapak Sumardi) dan ucapan terima kasih juga ditujukan pula kepada para tamu undangan. Si pembicara (orang pertama yang menyampaikan sambutan) bertugas mengisi acara walimah akikah agar berjalan lancar.

(28) *Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berbahagia!*

*Kami atas nama Bapak Panut sekeluarga mengucapkan **terima kasih** atas kehadiran para tamu undangan dalam acara ulang tahun perkawinan yang ke-25 tahun mudah-mudahan pertemuan kita saat ini mendapat ridha dari Allah SWT dan kita diberi umur panjang dan berkah, sehingga bisa kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, Amin. Di samping itu marilah kita berdoa semoga ulang tahun perkawinan perak Bapak Panut dan isteri ini menambah mesra dan sayang, serta mendapat rejeki yang banyak lagi berkah*

*dan segala cita-citanya bisa tercapai dan sukses.*  
(Pidato Ulang Tahun Perkawinan)

### **2.2.2 Bagian Isi**

Bagian isi merupakan inti pidato. Bagian ini berisi uraian atau rincian pidato. Karena merupakan pokok pembicaraan (inti pidato), bagian ini dapat berupa banyak paragraf, tergantung dari isi pidato yang akan disampaikan. Kalau persoalan yang disampaikan itu banyak hal, bagian ini akan memiliki banyak paragraf.

#### **2.2.2.1 Jenis Bagian Isi Berdasarkan Muatan Informasi**

Menurut Rakhmat (2001), muatan informasi pidato pada bagian isi dapat dipilah menjadi (a) pernyataan informatif, (b) pernyataan persuasif, dan (c) pernyataan rekreatif. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis isi pernyataan.

##### **(a) Pernyataan Informatif**

Diuraikan Rakhmat (2001:89) bahwa sesuai dengan namanya, pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi. Pernyataan informatif merupakan upaya untuk menanamkan pengertian. Oleh karena itu, secara keseluruhan, pidato informatif harus jelas, logis, dan sistematis. Pada dasarnya, pernyataan informatif itu merupakan tindakan untuk memberi tahu, menerangkan, atau menjawab. Tindakan memberi tahu atau memberi informasi itu ditujukan kepada O2 (mitra wicara), yang dalam pidato berwujud pendengar (orang yang mendengarkan pidato). Sehubungan dengan wujudnya, pidato informatif dapat berupa pernyataan, ilustrasi, penegasan, dan penunjukkan.

##### **(b) Pernyataan Persuasif**

Persuasi diberi pengertian sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri (Rakhmat, 2001:102). Pernyataan persuasif merupakan pernyataan yang mempunyai tujuan un-

tuk mempengaruhi manusia. Tujuan tersebut dapat dipilah menjadi tiga, yaitu (a) menarik perhatian, (b) meyakinkan, dan (c) menyentuh atau menggerakkan.

### (c) Pernyataan Rekreatif

Pernyataan rekreatif berada pada tahap perhatian. Tidak diperlukan upaya untuk menimbulkan kebutuhan akan informasi atau menonjolkan masalah yang harus dipecahkan (Rakhmat, 2001:134). Pada pernyataan rekreatif sering diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan humor, ironi, dan penghargaan (sanjungan).

Namun, dari hasil pengamatan atas data, contoh pernyataan informatif dan persuasif yang banyak ditemukan. Pernyataan rekreatif yang sebagai inti pidato tidak banyak.

Pengamatan struktur dan jenis unsur bagian isi dilakukan dengan cara mendeskripsikan menurut realisasinya, bukan terpilah atas ketiga jenis pernyataan di atas. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam sebuah teks pidato ketiga pernyataan tersebut sering digunakan secara bersamaan, atau hanya memuat dua pernyataan. Maksudnya, bagian isi sebuah teks pidato dapat memuat/berisi (a) tiga pernyataan (informatif-persuasif-rekreatif), (b) dua pernyataan (informatif-persuasif), dan (c) satu pernyataan (informatif), dengan berbagai variasi susunannya. Oleh karena itu, pembahasan struktur isi pada tulisan ini berdasarkan isi rinci pidato yang dituangkannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pada umumnya bagian isi sebuah wacana pidato memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. latar belakang,
- b. permasalahan,
- c. persoalan,
- d. dasar pemikiran,
- e. target (tuntutan, keinginan),
- f. dukungan,
- g. himbauan (permohonan, ajakan),

- h. instruksi,
- i. solusi (pendapat),
- j. pemikiran atau antisipasi,
- k. kemanfaatan,
- l. simpulan,
- m. pengumuman atau penawaran,
- n. harapan (nasihat), dan
- o. pernyataan rekreatif (yang terdiri atas pernyataan “penghargaan”, pernyataan “selamat”, dan pernyataan untuk “menyambut”).

Namun, perlu dikemukakan bahwa sebuah teks pidato belum tentu memiliki semua unsur di atas. Unsur itu digunakan sesuai kebutuhan, tergantung peristiwa atau kegiatan yang dilaksanakan atau dibicarakan (misalnya, pidato tentang: pembukaan suatu kegiatan, penutupan suatu kegiatan, pengarahan/koordinasi, penyampaian mandat, nasihat, peresmian gedung, peringatan, dan laporan).

Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa jenis susunan unsur bagian isi teks pidato beserta uraian realisasinya. Masing-masing data teks pidato dideskripsikan atas kepemilikan unsur dan susunannya. Untuk mempermudah pembacaan, uraian jenis susunan itu disebut variasi susunan, seperti berikut.

### **1. Teks Variasi Susunan [a]**

Teks variasi susunan ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) imbauan,
- ii) dukungan,
- iii) latar belakang dan permasalahan,
- iv) dasar pemikiran,
- v) tuntutan, dan
- vi) kemanfaatan.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Sebagai contoh perhatikan data berikut.

Contoh (29)

Judul: SAMBUTAN BUPATI KULON PROGO  
PADA ACARA  
PEMBUKAAN PELATIHAN  
PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MODEL  
PENGOLAHAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
Wates, 20 Juni 2005

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

i) **Imbauan**

Pernyataan imbauan terealisasi pada paragraf ke-2 dimulai dengan kalimat ketiga sebagai berikut.

*... Melalui pelatihan ini, kami harapkan **dapat menjadi sarana penyamaan persepsi, tentang penggunaan bahasa Indonesia secara tekstual yang baik dan benar, khususnya dalam penyusunan tata naskah dinas dalam rangka pengembangan model pengolahan informasi pembangunan. Ke depannya, dengan dimilikinya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar terutama dalam tata naskah dinas ini, tentunya akan mempermudah dalam proses pengolahan dan penyebarluasan informasi, baik internal lembaga itu sendiri, maupun antar komponen perangkat pemerintah guna mengimplementasikan program-program operasional pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.** ...*

Pernyataan himbauan pada teks di atas berisi tentang himbauan untuk (a) menyamakan persepsi dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara tekstual dan (b) mengimplementasikan program-program operasional pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.



## ii) Dukungan

Pernyataan dukungan terealisasi pada paragraf ke-2 kalimat keempat sebagai berikut.

*...ke depannya, dengan dimilikinya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar terutama dalam tata naskah dinas ini, tentunya hal itu akan mempermudah dalam proses pengolahan dan penyebarluasan informasi, baik internal lembaga itu sendiri, maupun antar komponen perangkat pemerintah guna mengimplementasikan program-program operasional pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.*

Dukungan yang dinyatakan pada teks di atas yaitu dengan dimilikinya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam tata naskah dinas ini, akan mempermudah kinerja dalam proses pengolahan dan penyebarluasan informasi.

## iii) Latar Belakang dan Permasalahan

Pernyataan latar belakang dan permasalahan terealisasi pada paragraf ke-4 kalimat pertama sebagai berikut.

*Sudah menjadi konsekuensi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam kebijakannya untuk **mewujudkan peningkatan administrasi pemerintahan**, dalam hal ini pelaksana administrasi khususnya unsur kesekretariatan memegang peranan penting, sama dan sederajat pentingnya dengan pelaksana yang lain dalam lingkungan kerja masing-masing. Bahkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan, pelaksana administrasi khususnya naskah kesekretariatan memegang peranan yang sangat menentukan bagi kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan.*

Inti pernyataan latar belakang dan permasalahan dapat dilihat pada bagian yang dicetak tebal pada teks di atas, yaitu Pemda Kulonprogo ingin mewujudkan peningkatan administrasi pemerintahan, dalam hal ini pelaksana administrasi khususnya unsur kesekretariatan yang berkaitan dengan kecepatan dan

ketepatan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan kebijakan.

#### iv) **Dasar Pemikiran**

Pernyataan pemikiran terealisasi pada paragraf ke-5 kalimat pertama sebagai berikut.

*Sementara itu, berkaitan dengan UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah maka pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi penanaman modal anantara lain merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.*

Dasar pemikiran yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan ialah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

#### v) **Tuntutan**

Pernyataan tuntutan terealisasi pada paragraf ke-6 kalimat pertama sebagai berikut.

*Di sisi lain dengan kompleks dan dinamisnya kegiatan administrasi pemerintahan, semakin **menuntut** adanya pengelolaan informasi yang tepat dan sistematis yang dalam waktu singkat akan dimanfaatkan sebagai acuan pengambilan keputusan.*

Inti pernyataan tuntutan dari teks di atas ialah semakin menuntut adanya pengelolaan informasi yang tepat dan sistematis.

#### vi) **Kemanfaatan**

Pernyataan kemanfaatan terealisasi pada paragraf ke-6 kalimat ketiga sebagai berikut.

*Oleh karena itu, kami menilai kegiatan ini memiliki **manfaat dan andil** yang besar dalam kelancaran proses administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.*

Pernyataan kemanfaatan dapat dilihat dengan adanya penanda yang berupa klausa *kegiatan ini memiliki manfaat dan andil yang besar dalam....*

## 2. Teks Variasi Susunan [b]

Teks tipe susunan ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang,
- ii) dasar pemikiran,
- iii) target/tuntutan,
- iv) imbauan,
- v) instruksi pertama,
- vi) instruksi kedua, dan
- vii) nasihat.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Sebagai contoh perhatikan data berikut.

Contoh (30)

Judul: SAMBUTAN BUPATI KULON PROGO  
PADA ACARA PELATIHAN  
CALON FASILITATOR PEMBERDAYAAN  
KELUARGA MISKIN DAN PENYUSUNAN PETA  
KEMISKINAN DESA HARGOWILIS, DESA  
HARGOREJO, KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO

Wates, 14 Juni 2006

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

### i) Latar Belakang

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-3 kalimat ketiga dan alinea ke-4 kalimat kedua sebagai berikut.

*...Program ini merupakan program bersama antar Pemda Kabupaten Kulon Progo dengan Yayasan Cakra Kinarya*

*Bangsa Jakarta, dengan materi pemberdayaan keluarga miskin dan penyusunan peta kemiskinan yang akan dilaksanakan di Desa Hargowilis dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.*

(paragraf ke-3 kalimat ketiga)

*...Program ini sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang mengutamakan kemandirian dan bertumpu pada kekuatan sendiri untuk senantiasa kerja keras “Ngulir Budi” baik dibidang pelatihan (Self Training), permodalan, perencanaan, pemberian insentif fasilitator dengan...*

(alinea ke-4)

## ii) Dasar Pemikiran

Pernyataan dasar pemikiran terealisasi pada paragraf ke-4 kalimat kelima sebagai berikut.

*...Adapun hak-hak dasar (Basic Human Rights) tersebut antara lain meliputi : Hak atas kecukupan dan mutu pangan, hak mendapat layanan kesehatan yang bermutu, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, hak mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usaha, baik untuk mendapatkan layanan perumahan dan sanitasi, hak untuk mendapatkan air bersih, baik atas kepemilikan dan penguasaan tanah, hak untuk terbebas dari memburuknya lingkungan hidup dan sumber alam, baik mendapatkan jaminan rasa aman, hak berpartisipasi, hak untuk mengatur kehamilan dan kelahiran dan baik untuk terbebas dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.*

## iii) Target/Tuntutan

Pernyataan target/tuntutan terealisasi pada paragraf ke-4 kalimat ketujuh dan kedelapan sebagai berikut.

*...Dengan langkah ini diharapkan dalam waktu yang relatif singkat keluarga miskin kecamatan Kokap akan **menunjukkan peningkatan kesejahteraan** yang berarti. Hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah **peningkatan SDM** yang me-*

*rupakan modal dasar untuk membangun di segala bidang melalui pendidikan dan keterampilan baik formal maupun non formal.*

**iv) Imbauan**

Pernyataan imbauan terealisasi pada paragraf ke-4 kalimat kesembilan sebagai berikut.

*...Untuk itu, kiranya (kita) **perlu mensukseskan** program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kokap.*

**v) Instruksi Pertama**

Pernyataan instruksi pertama terealisasi pada paragraf ke-5 kalimat pertama sebagai berikut.

*Untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, idealnya setiap keluarga mempunyai sumber penghasilan jangka pendek (harian), jangka menengah (bulanan) dan jangka panjang (tahunan).*

**vi) Instruksi Kedua**

Pernyataan instruksi kedua terealisasi pada paragraf ke-5 kalimat keempat sebagai berikut.

*...Selanjutnya kami minta saudara Camat Kokap bersama seluruh **"Stakeholder"**, pengusaha, pedagang dengan seluruh komponen masyarakat Kecamatan Kokap untuk bahu membahu berkoordinasi, bekerjasama demi suksesnya program ini.*

**vii) Nasihat**

Pernyataan nasihat terealisasi pada paragraf ke-6 kalimat keempat sebagai berikut.

*...Hambatan pasti ada, hadapi dan pecahkan secara bijak dan proporsional serta jangan mudah putus asa.*

**3. Teks Variasi Susunan [c]**

Teks tipe susunan ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang permasalahan,
- ii) dasar pemikiran,
- iii) dukungan,
- iv) target/keinginan,
- v) solusi,
- vi) simpulan, dan
- vii) harapan.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Sebagai contoh perhatikan data berikut.

Contoh (31)

Judul:           SAMBUTAN PADA PENUTUPAN  
                   RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI  
                   TAHUN 2003  
                   Tanggal, 17 Juli 2003

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi teks pidato dengan unsur yang tersusun seperti pada contoh di atas terealisasi dalam paragraf seperti di bawah ini.

#### **i) Latar Belakang Permasalahan**

Pernyataan latar belakang permasalahan terealisasi pada paragraf ke-2 sebagai berikut.

*Dalam hubungan itu, ijinilah kami mengucapkan syukur atas berbagai kesepakatan yang telah berhasil kita rumuskan dalam rapat kerja ini, yang pada intinya adalah sebagai jawab guna meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan, bersinergi guna lebih memperteguh komitmen kita merealisasikan Program Kerja Komisariat Wilayah III APEKSI Tahun 2002-2004, guna terwujudnya keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 1999.*

## ii) Dasar Pemikiran

Pernyataan dasar pemikiran terealisasi pada paragraf ke-3 sebagai berikut.

*Kiranya kita sepakat, bahwa agar apa yang diamanatkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 itu akan manives ke alam wujud manakala atmosfer yang melingkupi segala kebijakan atau **political will** dan **good will** pemerintah daerah mengedepankan daya-upaya guna peningkatan pemberdayaan, bukan pemerdayaan masyarakat.*

## iii) Dukungan

Pernyataan Dukungan terealisasi pada paragraf ke-5 kalimat pertama dan kedua sebagai berikut.

*Diasumsikan bahwa **kegiatan pembangunan merupakan sebuah kewajaran harus mampu memotivasi proses.kemandirian masyarakat**. Ada hipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses kemandirian tersebut. Tanpa adanya kemandirian, maka bentuk partisipasi masyarakat itu tidak lain adalah proses mobilisasi belaka.*

## iv) Target/Keinginan

Pernyataan target/keinginan terealisasi pada paragraf ke-6 kalimat pertama dan kedua sebagai berikut.

*Dalam **implementasi pemberdayaan masyarakat**, aparatur daerah sebagai salah satu sosok pemberdaya jelas berperan sentral. Dan, pemberdaya merupakan sebuah kemestian merupakan sosok-sosok pembebas sebagai aktor yang menyayungi semua masyarakat dengan segala komponennya secara adil dan merata dan menjauhkan perilaku diskriminatif karena pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pembebasan manusia yang hanya bisa direalisasi oleh manusia dan institusi yang terjaga kualitas, integritas, dan independen.*

#### v) Solusi

Pernyataan solusi terealisasi pada paragraf ke-7 kalimat pertama dan kedua sebagai berikut.

*Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan segala jajarannya merespond dengan positif dan bertekad meningkatkan kerjasama antar daerah guna semakin meneguhkan peran KOMWIL III APEKSI baik secara internal dan eksternal. Demikian pula tak kalah pentingnya agar KOMWIL III APEKSI mampu merumuskan dan menyamakan persepsi guna mencari penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan aspirasi dan kepentingan daerah.*

#### vi) Simpulan

Pernyataan simpulan terealisasi pada paragraf ke-8 kalimat pertama sebagai berikut.

*Kiranya kita sepakat, agar amanat UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjelma ke alam wujud, men-syaratkan terbangun kokohnya keterkaitan hubungan yang saling membantu di antara kita.*

#### vii) Harapan

Pernyataan harapan terealisasi pada paragraf ke-8 kalimat kedua sebagai berikut.

*...Kami mempunyai harapan besar, perembugan kita lebih lanjut semakin meneguhkan jiwa dan semua APEKSI yang komunikatif-dialogis, dan aspiratif atas kepentingan daerah.*

### 4. Teks Variasi Susunan [d]

Teks tipe susunan ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang,
- ii) permasalahan,
- iii) dukungan,



- iv) solusi, dan
- v) harapan.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Sebagai contoh perhatikan data berikut.

Contoh (32)

Judul:                   SAMBUTAN GUBERNUR  
                          DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
                          PADA RAPAT PENELAAHAN PROGRAM KB  
                          NASIONAL TAHUN 2003  
                          25 Oktober 2003

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

**i) Latar belakang**

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-2 kalimat sebagai berikut.

*Setelah kita ikuti bersama laporan dari Kepala BKKBN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu hal yang penting untuk kita cermati bersama khususnya tentang angka kelahiran tahun 2003 yang dilaporkan meningkat tajam dari 1,43 di tahun 2000 menjadi 1,9. Kenaikan ini apabila berlangsung secara terus menerus lambat-laun akan sangat berpengaruh khususnya dalam konteks membangun keluarga sejahtera. Kalaupun dalam skala nasional kenaikan angka kelahiran juga ada, namun sekarang ini kita memang harus berpikir lebih arif, terutama dalam konteks pembangunan di bidang sosial ekonomi, yang sebaiknya memang tanpa harus dihadapkan pada masalah pengaturan kelahiran.*

**ii) Permasalahan**

Pernyataan permasalahan terealisasi pada paragraf ke-3 sebagai berikut.

*Hal ini penting untuk kami sampaikan sebab bagaimanapun juga jumlah penduduk yang meningkat sangat berpengaruh*

*secara signifikan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan di bidang sosial ekonomi.*

### iii) Dukungan

Pernyataan dukungan terealisasi pada paragraf ke-4 sebagai berikut.

*Program Keluarga Berencana selama ini berjalan dengan baik atas **dukungan dari seluruh lapisan masyarakat** termasuk juga peran serta penyuluh KB. Untuk kondisi sekarang ini meskipun kita dihadapkan kepada upaya pengaturan angka kelahiran, namun secara terus menerus kita diharapkan untuk dapat mengembangkan konsep Good Family yang selama ini menjadi konsep dan komitmen pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. **Kami yakin bahwa** keluarga yang berkualitas akan meningkatkan ketahanan bangsa dan negara kita.*

### iv) Solusi

Pernyataan solusi terealisasi pada paragraf ke-5 sebagai berikut.

*Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara nyata tidak mempunyai sumberdaya alam yang dapat diandalkan, namun di sisi lain **kita memiliki potensi sumberdaya manusia yang sangat besar dan dapat dioptimalkan potensinya.** Dan yang lebih membanggakan, hampir semua lini kehidupan dalam sektor formal maupun nonformal dapat menerima sumberdaya manusia dari daerah kita, bahkan dalam skala tertentu SDM kita juga memiliki ketahanan yang cukup tinggi dan dapat terjun dalam persaingan di pasar global, serta mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.*

### v) Harapan

Pernyataan harapan terealisasi pada paragraf ke-8 kalimat kedua dan ketiga sebagai berikut.

...Beberapa sumbang peran dan pemikiran yang positif dan aplikabel **diharapkan dapat** dimunculkan dalam forum ini. Sementara itu, berbagai program yang telah berjalan perlu dikaji kembali dan dievaluasi **agar nantinya** dalam pelaksanaan integrasi kelembagaan BKKBN dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaan program KB nasional akan semakin efektif dan efisien.

## 5. Teks Variasi Susunan [e]

Teks tipe susunan ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang,
- ii) tuntutan/target,
- iii) permasalahan,
- iv) keinginan, dan
- v) pemikiran dan solusi.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Sebagai contoh perhatikan data berikut.

Contoh (33)

Judul: WALIKOTA YOGYAKARTA

.....  
SAMBUTAN PADA RAPAT KERJA  
KOMISARIAT WILAYAH III  
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH  
INDONESIA (APEKSI) TAHUN 20003  
Tanggal, 16 Juli 2003

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

### i) Latar belakang

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-2 kalimat pertama dan kedua sebagai berikut.

*Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan hampir tiga tahun.  
Dan, dalam perjalanannya sudah banyak pengalaman yang*

dihadapi oleh daerah dalam mewujudkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.

ii) **Tuntutan/target**

Pernyataan tuntutan/target terealisasi pada paragraf ke-2 kalimat keempat dan keempat sebagai berikut.

*Dalam impletasinya daerah **dituntut** untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang akan menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai lembaga yang **mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan** kepada masyarakat, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi pemahaman umum harus mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan pelayanan.*

iii) **Permasalahan**

Pernyataan permasalahan terealisasi pada paragraf ke-3 kalimat pertama sebagai berikut.

*Kiranya kita sama-sama merasakan di era globalisasi ini kadang **menghadapi situasi yang penuh dengan pendadakan perubahan** yang tiba-tiba dan kecenderungan ketidakteraturan di bidang birokrasi baik pada tataran koordinasi teknis hingga kebijakan.*

iv) **Keinginan**

Pernyataan keinginan terealisasi pada paragraf ke-3 kalimat ketiga sebagai berikut.

*...Untuk mengantisipasinya kita tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bahkan merasa dengan kekuatan sendiri mampu menanggulangi atau memecahkan persoalan-persoalan itu.*

v) **Pemikiran dan Solusi**

Pernyataan pemikiran terealisasi pada paragraf ke-4 kalimat pertama sebagai berikut.



Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

i) **Latar Belakang**

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-2 sebagai berikut.

*Penerapan otonomi sekarang ini secara signifikan telah membawa perubahan-perubahan dan pembangunan di daerah-daerah. Suatu hal yang sangat positif adalah bahwa otonomi telah membangkitkan kesadaran tiap-tiap daerah untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi yang dimiliki agar perekonomian daerah dapat berkembang secara optimal. Berangkat dari sini kemudian muncul kreativitas dan inovasi daerah-daerah yang terlihat dari berbagai program yang dilaksanakan agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan memberikan manfaat maksimal kepada daerah.*

ii) **Pemikiran**

Pernyataan pemikiran terealisasi pada paragraf ke-4 sebagai berikut.

*Dalam era otonomi di samping kompetisi kooperasi merupakan sisi lain yang perlu dipacu agar keunggulan suatu daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan membangun networking dengan daerah lain. Sebaliknya, **kelemahan daerah dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi untuk memanfaatkan keunggulan daerah lain.** Dengan demikian tidak selamanya kompetitor harus menjadi pesaing, namun pada bidang-bidang tertentu dapat pula menjadi dari bagian dari networking yang dibangun bersama. Sebab bisa saja efektifitas dari suatu usaha untuk meningkatkan perekonomian akan lebih produktif kalau dilakukan secara kalaboratif dengan daerah lain.*

iii) **Keinginan**

Pernyataan keinginan terealisasi pada paragraf ke-5 kalimat kedua sebagai berikut.

... Dalam konteks ini maka keberhasilan suatu daerah tidak hanya semata-mata dilihat dari kemampuan daerah berkompetisi dengan daerah lain, namun **bagaimana daerah dapat membangun networking untuk membangun kekuatan kolektif antar daerah** agar dapat berkompetisi di tingkat global dan saling mendukung dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor global.

#### iv) Tuntutan

Pernyataan tuntutan terealisasi pada paragraf ke-6 kalimat pertama dan kedua sebagai berikut.

*Dalam ekonomi yang sudah mengglobal, maka **tiap-tiap daerah harus mempersiapkan diri memasuki arena global**. Dalam bukunya World Class, Kanter menulis bahwa dalam lingkungan yang sudah mengglobal maka tiap-tiap daerah juga harus “**world ready, foreign, globally skilled dan partnership oriented**” dalam rangka menarik sumber daya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi daerah.*

#### v) Persoalan

Pernyataan persoalan terealisasi pada paragraf ke-7 kalimat kedua sebagai berikut.

*... Banyak fenomena berkaitan dengan itu dapat kita lihat seperti pengangguran yang semakin tinggi, kriminalitas, kemerosotan kualitas infrastruktur, pelayanan publik yang menurun dan rentetan permasalahan yang satu sama lain saling berkait dan semakin kompleks sehingga sulit diuraikan satu persatu.*

#### vi) Solusi

Pernyataan solusi terealisasi pada paragraf ke-8 sebagai berikut.

*Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu diambil kebijakan-kebijakan, baik di tingkat nasional, di tingkat propinsi, di tingkat kota, atau secara sektoral. Dalam konteks ini pada*

*kemandirian dan kebersamaan menjadi sangat penting. Tema ini akan bermakna kalau kemudian dapat dirumuskan sebuah action plan bersama yang didahului dengan pengkajian-pengkajian secara komprehensif dan mendalam.*

### **vii) Harapan dan Imbauan**

Pernyataan harapan dan imbauan terealisasi pada paragraf ke-9 sebagai berikut.

*Saya berharap forum ini dapat meningkatkan aktualisasi semangat kemandirian dan kebersamaan tersebut.*

## **7. Teks Variasi Susunan [g]**

Teks tipe susunan ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang,
- ii) pokok-pokok permasalahan,
- iii) persoalan umum,
- iv) keinginan pertama,
- v) keinginan kedua,
- vi) solusi pertama dan kedua,
- vii) dukungan dan ajakan,
- viii) imbauan, dan
- ix) pengumuman dan penawaran.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Struktur tersebut terdapat pada data berikut.

Contoh (35)

Judul:           DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
                  REPUBLIK INDONESIA

PAPARAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
PADA RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI



KEMANDIRIAN PEMERINTAH KOTA DALAM  
OTONOMI DAERAH

Yogyakarta, 16 Juli 2003

---

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

**i) Latar Belakang**

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-1 kalimat ketiga sebagai berikut.

*...Saya menilai Rapat kerja ini mempunyai arti penting untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai isu strategis perkotaan yang semakin lama mempunyai permasalahan semakin kompleks, sehingga APEKSI sebagai wadah Pemerintah Kota harus selalu sanggup dan kreatif dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada tataran konseptual maupun implementasi.*

**ii) Pokok-Pokok Permasalahan**

Pernyataan pokok-pokok permasalahan terealisasi pada paragraf ke-2 kalimat ketiga dan keempat sebagai berikut.

*...Namun di sisi yang lain, daerah perkotaan mempunyai permasalahan yang cukup kompleks dan spesifik dibandingkan dengan wilayah perdesaan karena daerah perkotaan identik dengan tingkat kegiatan manusia yang sangat dinamis dan modern. Permasalahan pengelolaan perkotaan semakin lama semakin kompleks karena menyangkut beragamnya stakeholder maupun kepentingan.*

Di antara beberapa permasalahan Pemerintah Kota yang menonjol dapat diklasifikasi sebagai berikut.

- a. Masalah Kelembagaan
- b. Masalah Manajemen Pelayanan
- c. Masalah kerjasama Antar-daerah
- d. Masalah Status Kota
- e. Masalah Partisipasi Masyarakat

### iii) Persoalan Umum

Pernyataan persoalan umum terealisasi pada paragraf ke-9 sebagai berikut.

*Terkait dengan Otonomi Daerah, telah banyak ditafsirkan secara berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kuran keterbukaan telah dibuka lebar-lebar sehingga semua orang bisa dengan tenang berpendapat dan merasa benar terhadap pendapatnya sendiri. Demokrasi sering ditafsirkan dengan berdemo sebebaskan-bebasnya. Dalam bidang ketatanegaraan kita lihat masih terjadi kerancuan hubungan antara eksekutif dan legislatif sehingga menjurus saling tuduh dan menjatuhkan. Dalam kehidupan berbangsa, sebagian kecil wilayah yang dimotori oleh gerombolan tertentu telah berusaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya potret kehidupan yang terjadi akhir-akhir ini akibat eforia otonomi daerah.*

### iv) Keinginan Pertama

Pernyataan keinginan terealisasi pada paragraf ke-10 kalimat keempat sebagai berikut.

*Tantangan dan peluang tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan **bagaimana cara mengimplementasikan otonomi daerah sebaik-baiknya**. Hal ini tentu menentukan strategi yang matang sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara harmonis (in harmonia progression).*

### v) Keinginan Kedua

Pernyataan persoalan khusus terealisasi pada paragraf ke-11 kalimat keempat sebagai berikut.

*Untuk itu diperlukan rumusan strategi yang tepat untuk menjadikan pemerintah dan masyarakat semakin produktif, semakin kreatif, dan semakin kompetitif.*

#### vi) Solusi Pertama dan Kedua

Pernyataan solusi pertama kedua terealisasi pada paragraf ke-12 sebagai berikut.

*Banyak faktor-faktor yang mendorong suatu pemerintah daerah untuk semakin mandiri, di antaranya adalah*

- a. *Aparat Pemerintah yang trampil, tanggap terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.*
- b. *Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.*
- c. *Kerja sama yang baik antara stakeholder yang terkait dengan pemerintahan, baik itu Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta.*

Pernyataan solusi kedua terealisasi pada paragraf ke-13 kalimat keempat sebagai berikut.

*Untuk itu diperlukan dialog-dialog yang intensif **dalam rangka memecahkan permasalahan** yang ada, baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan. Melalui dialog ini diharapkan dapat diperoleh berbagai pendapat yang bersifat **membangun dan menyelesaikan permasalahan.***

#### vii) Dukungan dan Ajakan

Pernyataan dukungan terealisasi pada paragraf ke-14 kalimat ketiga sebagai berikut.

*... Aparat pemerintah kota sudah saatnya untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya sesuai dengan perkembangan dunia yang semakin cepat dan modern.*

Pernyataan ajakan terealisasi pada paragraf ke-14 kalimat keenam, ketujuh, dan kedelapan sebagai berikut.

*... Peningkatan kapasitas aparat dan pemerintah kota tersebut juga harus dibarengi dengan itikad yang baik oleh seluruh stakeholder kota, pihak-pihak yang tidak sekedar berpendapat “pemerintah pasti salah”, namun **hendaknya memberikan kontribusi yang nyata dan konstruktif bagi pembangunan kota keseluruhan.** Bukan saatnya lagi untuk saling tuding dan mencari kambing hitam dalam keadaan*

*krisis bangsa saat ini. Semua pihak harus berpikir keras, apa yang terbaik yang dapat saya berikan untuk perbaikan negeri tercinta ini.*

#### **viii) Imbauan**

Pernyataan imbauan terealisasi pada paragraf ke-15 kalimat kedua sebagai berikut.

*...Untuk Pemerintah Kota, pada kesempatan kali ini saya ingatkan kembali 3 (tiga) fungsi yang melekat padanya, yaitu*

- 1. Fungsi Pelayanan Masyarakat (Public Service Function),*
- 2. Fungsi pembangunan (Development Function),*
- 3. Fungsi Perlindungan Masyarakat (Policive Function).*

#### **ix) Pengumuman dan Penawaran**

Pernyataan pengumuman dan penawaran terealisasi pada paragraf ke-16 sebagai berikut.

*Untuk itu, Departemen Dalam Negeri dalam beberapa waktu terakhir ini memfasilitasi beberapa daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif dalam berbagai bidang seperti:*

- \* pelayanan kepada masyarakat seperti: memperkenalkan produk perijinan yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan,*
- \* peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,*
- \* pengelolaan lingkungan perkotaan,*
- \* pengembangan ekonomi daerah,*
- \* kerja sama antar daerah dan lain-lain.*

### **8. Teks Variasi Susunan [h]**

Teks tipe susunan bagian isi ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang,
- ii) dasar pemikiran,
- iii) permasalahan (realitas 1, realitas 2, realitas 3, realitas 4),

- iv) kebutuhan atau tuntutan,
- v) tujuan, dan
- vi) laporan.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf pada data berikut.

Contoh (36)

Judul:

LAPORAN KEPALA BKKBN PROPINSI DIY  
PADA RAPAT PENETAAHAN PROGRAM KB  
NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2003

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

**i) Latar Belakang,**

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-3 sebagai berikut.

*Rapat Penelaahan KB Nasional kali ini mempunyai arti dan makna yang sangat strategis karena dilaksanakan menjelang diserahkannya sebagian kewenangan urusan bidang KB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.*

**ii) Dasar Pemikiran,**

Pernyataan dasar pemikiran terealisasi pada paragraf ke-5 dan 6 sebagai berikut.

*Di sisi lain **memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Propenas, serta Properda DIY (Perda Nomor 3 tahun 2002) BKKBN diberi tanggung jawab pokok untuk melaksanakan empat program:***

- 1. Program Pemberdayaan Keluarga*
- 2. Program Keluarga Berencana*
- 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja*
- 4. Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB*

*Alasan lain mengapa Program KB masih harus dilanjutkan di DIY adalah adanya komitmen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia seperti Internasional Conference on Population and Development (ICPD) Cairo 1994 dan Beijing Platform for Action 1995 yang menyangkut isu-isu penting seperti hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan perempuan serta keadilan gender dan kesetaraan gender termasuk partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi.*

### **iii) Permasalahan**

Pada teks ini pernyataan permasalahan terungkap dalam empat realitas, yang disebut sebagai realitas 1, realitas 2, realitas 3, realitas 4, yaitu pada paragraf ke-7 sampai ke-14, yang terdiri atas empat hal sebagai berikut.

**Permasalahan** realitas 1, yaitu tentang *Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)*.

**Permasalahan** realitas 2, yaitu tentang *Angka Partisipasi Peserta KB*.

**Permasalahan** realitas 3, yaitu tentang *Kesehatan Reproduksi Remaja*.

**Permasalahan** realitas 4, yaitu tentang *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*.

### **iv) Kebutuhan atau Tuntutan**

Pernyataan kebutuhan atau tuntutan terealisasi pada paragraf ke-15. Paragraf ini terdiri atas enam rincian dengan (gambaran) format urutan sebagai berikut.

*Di samping keberhasilan Program KB Nasional yang dicapai sampai dengan bulan September 2003 masih banyak tantangan kedepan yang dihadapi antara lain:*

- 1. Dengan kondisi kelembagaan yang...(satu kalimat )...*
- 2. Dalam Era Reformasi ...(satu kalimat )...*
- 3. Keberadaan PKB/PLKB sebagai...(satu kalimat )...*
- 4. Memperhatikan tantangan...(satu kalimat )....*

5. Agar upaya membangun...(satu kalimat )...

6. Mengantisipasi penyerahan sebagian...(satu kalimat )...

v) **Tujuan,**

Pernyataan tujuan terealisasi pada paragraf ke-16 sebagai berikut.

***Tujuan pertemuan** hari ini disamping untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai, menginventarisasi permasalahan, juga menyusun program sampai dengan akhir tahun 2003 dan Rancangan Program KB di Era Otonomi.*

vi) **Laporan**

Pernyataan laporan terealisasi pada paragraf ke-17, yang berisi tentang laporan tema rapat, materi pertemuan, dan peserta pertemuan, yaitu sebagai berikut.

*Rapat Penelaahan tahun ini **mengambil tema**: “Dengan semangat desentralisasi kita mantapkan kesinambungan Program dan kelembagaan KB nasional dalam rangka pembangunan berkelanjutan”. Sedangkan, **materi yang akan disajikan dan dibahas** di samping materi baku evaluasi, juga akan disajikan. Analisis Hasil SDKI tahun 2002 dari BPS Propinsi DIY, serta persiapan Pengintegrasian BKKBN Kabupaten dan Kota oleh Tim Otonomi Pemerintah Propinsi DIY. Untuk membahas materi tersebut, kami **mengundang sebanyak 120 orang dari berbagai unsur** baik pemerintah maupun LSM dan LSOM baik yang ada di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota, diharapkan pertemuan dapat diselesaikan pada pukul 15.00 WIB.*

9. **Teks Variasi Susunan [i]**

Teks tipe susunan ini memiliki unsur pernyataan rekreatif yang tersusun dengan urutan sebagai berikut

- i) pernyataan rekreatif, yang memuat pernyataan rekreatif (penghargaan), pernyataan rekreatif (selamat), dan pernyataan rekreatif (menyambut),

- ii) latar belakang,
- iii) tuntutan,
- iv) ajakan,
- v) solusi, dan
- vi) himbauan.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf. Contoh yang memiliki struktur tersebut, kebetulan ditemukan pada teks pidato dari instansi militer. Data teks pidato itu bertuliskan huruf kapital semua dan tanpa tanda baca. Data itu dapat dilihat pada teks yang berjudul “Sambutan Ketua Komwil III, Pembukaan Rapat Kerja, Komisariat Wilayah III Apeksi Tahun 2003”:

Contoh (37)

Judul: KETUA KOMWIL APEKSI III

.....  
 SAMBUTAN KETUA KOMWIL III  
 PEMBUKAAN RAPAT KERJA  
 KOMISARIAT WILAYAH III APEKSI TAHUN 2003  
 YOGYAKARTA, 16 JULI 2003  
 (.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

**i) pernyataan rekreatif**

Pernyataan rekreatif yang berupa pernyataan rekreatif (penghargaan) dan pernyataan rekreatif (selamat) terealisasi pada paragraf ke-1 kalimat kedua, yang wujudnya kalimat kompleks sebagai berikut.

*UNTUK ITU KAMI SELAKU KETUA KOMWIL III APEKSI DENGAN PENUH KETULUSAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN **PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA** KEPADA BAPAK WALIKOTA YOGYAKARTA BERSERTA JAJARANNYA YANG TELAH MENYIAPKAN DAN MELAKSANAKAN RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI*



INI DENGAN BAIK DAN PADA KESEMPATAN BAIK INI TAK LUPA KAMI **MENGUCAPKAN SELAMAT** DENGAN DILANTIKNYA BEBERAPA WALIKOTA YANG BARU ANTARA LAIN YAITU WALIKOTA SUKABUMI, WALIKOTA CIREBON, WALIKOTA BEKASI, WALIKOTA TASIKMALAYA.

Pernyataan rekreatif (menyambut) terealisasi pada paragraf ke-1 kalimat ketiga sebagai berikut.

*DISAMPING ITU PULAPADA KESEMPATAN INI KOMWIL III APEKSI **MENYAMBUT DENGAN RASA SYUKUR** DENGAN BERGABUNGNYA KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI ANGGOTA BARU KOMWIL III APEKSI DENGAN DEMIKIAN JUMLAH ANGGOTA DARI 22 BERTAMBAH MENJADI 23 KOTA SEBAGAI KETUA KOMWIL.*

## ii) **Latar Belakang**

Pernyataan latar belakang terealisasi pada paragraf ke-2 sebagai berikut.

*OTONOMI DAERAH YANG KINI TENGAH BERLANGSUNG AKAN BISA DIRASAKAN KEBERHASILANNYA APABILA DIIMBANGI BERBAGAI UPAYA KITA UNTUK MENTRANSFORMASIKAN SELURUH GAGASAN DAN KONSEP BARU DALAM MENATA ULANG STRUKTUR KULTUR. DAN MEMBANGUN SEBUAH SOSOK APARATUR SELAKU PENGELOLA PEMERINTAH KOTA DIMANA SELAIN HARUS MEMILIKI TINGKAT KAPASITAS ATAU KOMPETENSI DALAM BIDANGNYA JUGA DIIMBANGI DENGAN TINGKAT AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEPEMERINTAHAN KHUSUSNYA PEMERINTAHAN KOTA YANG MEMILIKI NORMA SERTA SEJUMLAH PRASYARAT TERTENTU SEHINGGA KE DEPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MANDIRI DAPAT DIWUJUDKAN.*

### iii) Tuntutan

Pernyataan tuntutan terealisasi pada paragraf ke-3 dan ke-4 sebagai berikut.

*KEBERADAAN APEKSI SEBAGAI MEDIA BERHIMPUNNYA PEMERITAHAN KOTA MEMILIKI PERAN YANG SANGAT STRATEGIS DALAM MENGANTISIPASI TANTANGAN PEMBANGUNAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA DI MASA DEPAN AKAN JAUH LEBIH KOMPLEKS KARENA TUNTUTAN GLOBALISASI DAN OTONOMI ITU SENDIRI PEMERINTAH KOTA DITUNTUT UNTUK BISABERKOMPETISI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN KOTA UNTUK ITULAH TEMA YANG DIAMBIL DALAM RAPAT KERJA INI ADALAH SANGAT SYARAT UNTUK DIBAHAS SEBAGAI TUNTUTAN PERKEMBANGAN MENEJEMEN KOTA.*

*UNTUK ITULAH SETIAP PEMERINTAH KOTA **DI-TUNTUT DAPAT MENINGKATKAN** KAPASITAS MANAJEMEN DAERAHNYA MASING-MASING SEHINGGA STRATEGI SETIAP PEMERINTAH KOTA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, MERUPAKAN SESUATU PRIORITAS PROGRAM YANG HARUS DILAKSANAKAN DAN TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR LAGI.*

### iv) Ajakan

Pernyataan ajakan terealisasi pada paragraf ke-5 sebagai berikut.

*DENGAN DEMIKIAN APEKSI DIMINTA UNTUK BISA BERPERAN MAKSIMAL DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MENEJEMEN PEMERINTAH KOTA BAIK DALAM PENGERTIAN YANG MELIPUTI KELEMBAGAAN KEUANGAN DAN MEKANISME SERTA PENGENDALIAN KEWENANGAN MAUPUN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIANYA.*

v) **Solusi**

Pernyataan solusi terealisasi pada paragraf ke-6 sebagai berikut.

*MEMBANGUN ALIANSI STRATEGIS ANTAR KOTA YANG FASILITAS OLEH APEKSI DAN ATAU MASING-MASING KOMISARIAT WILAYAH KOMWIL ADALAH PENTING SEHINGGA SOSOK KOTA DI MASA DEPAN SELAIN AKAN DIKELOLA OLEH APARATUR YANG LEBIH PROFESIONAL JUGA BISA MEWUJUDKAN SOSOK KOTA YANG LEBIH MANDIRI. DEMOKRATIS BERKEADILAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SEHINGGA PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE LEBIH PROFESIONAL OLEH SETIAP PEMERINTAH KOTA*

vi) **Imbauan**

Pernyataan imbauan terealisasi pada paragraf ke-7 sebagai berikut.

*DEMIKIANLAH BEBERAPA HARAPAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH KITA MANFAATKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN FORUM RAPAT KERJA YANG AKAN KITA LAKSANAKAN INI GUNA KEPENTINGAN MASA DEPAN KITA BERSAMA.*

**10. Teks Variasi Susunan [j]**

Teks pidato ini merupakan contoh teks pidato yang bertaraf nasional, yaitu teks pidato mendiknas. Teks tipe susunan bagian isi ini memiliki unsur yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

- i) latar belakang,
- ii) permasalahan,
- iii) pernyataan fakta, yang terdiri atas (a) pelaksanaan kegiatan dan (b) pelaporan kegiatan penyertaan.

Unsur dan struktur tersebut terealisasi dalam paragraf-paragraf seperti pada data berikut.

Contoh (38)

Judul:

**LAPORAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DALAM KONGRES BAHASA INDONESIA VIII**  
**DI HOTEL INDONESIA, JAKARTA**  
**14 Oktober 2003**

(.....Bagian Pembuka.....)

Bagian isi terealisasi seperti di bawah ini.

**i) Latar Belakang**

Pernyataan imbauan terealisasi pada paragraf ke-1 kalimat kedua sampai dengan keenam sebagai berikut.

*... Pada bulan yang sama 75 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda pejuang bangsa untuk pertama kali mengikrarkan sumpah suci yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan kebangsaan kita yang, antara lain dimotori oleh Muhammad Yamin. Sepuluh tahun kemudian (1938) diselenggarakan Konggres Bahasa Indonesia I di Solo. Selanjutnya, 16 tahun kemudian pada bulan yang sama pula atau 49 tahun yang lalu pemuda Yamin telah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan melaporkan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Setelah di Medan, penyelenggaraan Kongres baru dapat dilakukan pada 28 Oktober 1978, bertepatan dengan 50 tahun Sumpah pemuda dengan peserta 419 orang. Sejak itu Konggres Bahasa Indonesia selalu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan hingga kini penyelenggaraannya sudah mencapai bilangan ke delapan. Peserta sejak kongres pertama sampai dengan sekarang terus-menerus meningkat sebagai bukti bahwa sebagian dari kita masih memiliki perhatian yang besar terhadap bahasa nasional.*

## ii) Permasalahan

Pernyataan imbauan terealisasi pada paragraf ke-2 kalimat ketiga dan keempat sebagai berikut.

*Memang dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini makin terasa kuatnya pengaruh bahasa asing dalam pemakaian bahasa kita sehari-hari sehingga tidak sedikit di antara kita yang sangsi akan ketahanan bahasa nasional kita itu. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian pemerintah, penyelenggaraan Konggres Bahasa Indonesia VIII sangat tepat.*

## iii) Pernyataan Fakta

Pernyataan fakta terdiri atas (a) pelaksanaan kegiatan dan (b) pelaporan kegiatan penyertaan. Pernyataan fakta ini terealisasi pada paragraf ke-3 yang terinci menjadi lima butir pernyataan. Pernyataan fakta pelaksanaan kegiatan terealisasi pada butir (1)-(3) sebagai berikut.

1. *Konggres Bahasa Indonesia VIII yang bertema “Pemberdayaan bahasa Indonesia memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi” ini merupakan kongres yang pertama kali diadakan dalam abad ke-21 yang penentuannya amat memperhatikan aspirasi daerah.*

2. *Peserta kongres terdiri atas pejabat, tokoh, pakar, budayawan, ilmuwan, sastrawan, dosen, guru, dan pecinta bahasa Indonesia yang datang dari berbagai pelosok tanah air dan kota-kota besar dunia yang negaranya menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia. Peserta Konggres Bahasa Indonesia VIII selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kongres Bahasa Indonesia I dan II 200 – 300 orang, Kongres Bahasa Indonesia VII 850 orang, dan Kongres Bahasa Indonesia VIII mencapai 1.047 orang, bahkan masih banyak peminat yang terpaksa tidak mendapatkan tempat. Besarnya minat masyarakat terhadap kongres ini menggambarkan begitu besar perhatian masyarakat terhadap masalah bahasa dan sastra serta media massa.*

3. Pemakalah kongres terdiri atas 63 pemakalah dalam negeri dan 18 pemakalah luar negeri. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat swakarsa (atas inisiatif sendiri) yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dipilih dari 83 abstrak yang masuk ke panitia,

Pernyataan fakta pelaporan kegiatan penyertaan terealisasi pada butir (4) dan (5) sebagai berikut.

4. Dalam acara pembukaan ini akan diserahkan penghargaan kepada tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik, sastrawan, pengarang sayembara mengarang cerpen remaja, pemenang sayembara mengarang puisi SLTP, serta guru pemenang sayembara pembelajaran bahasa dan guru pemenang sayembara pembelajaran sastra, serta guru pemenang sayembara menulis cerpen dan mengulas novel. Semua itu di bawah koordinasi Departemen Pendidikan nasional.

5. Pada kesempatan acara pembukaan kongres ini akan diluncurkan terbitan buku kebahasaan dan kesastraan yang berupa **Kamus Pelajar SD, SLTP, dan SLTA, Bahasa Indonesia menuju Masyarakat madani, Ensiklopedia sastra Indonesia Modern, Adab dan Adat: Refleksi sastra Nusantara, Adalah bangsa dalam Sastra?, Puisi Indonesia sebelum Kemerdekaan: Sebuah catatan Awal**, dan beberapa buku lainnya.

#### 2.2.2.2 Kekhasan Ungkapan pada Paragraf Isi

Satuan-satuan lingual atau satuan kebahasaan yang digunakan pada bagian isi memiliki kekhasan. Kekhasan satuan kebahasaan itu tergantung pada unsur isi yang dimiliki oleh teks pidato yang bersangkutan, seperti yang telah dipaparkan pada subbab (2.2.2.1) tentang tipe susunan bagian isi, yang telah dijelaskan unsur dan susunannya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kekhasan ungkapan berdasarkan isi ada tiga, yaitu isi informatif, persuasif, dan rekreatif. Ketiga kekhasan pernyataan itu masih

dapat terpilah menjadi lima belas pernyataan. Sehubungan dengan itu, kekhasan ungkapan dan kosa kata yang digunakan sesuai dengan isi yang disampaikan, yaitu berkaitan dengan konsep (1) latar belakang, (2) permasalahan, (3) persoalan, (4) dasar pemikiran, (5) target (tuntutan, keinginan), (6) dukungan, (7) himbauan (permohonan, ajakan), (8) instruksi, (9) solusi (pendapat), (10) pemikiran atau antisipasi, (11) kemanfaatan, (12) simpulan, (13) pengumuman atau penawaran, (14) harapan (nasihat), (15) pernyataan rekreatif (yang terdiri atas pernyataan “penghargaan”, pernyataan “selamat”, dan pernyataan untuk “menyambut”).

### **2.2.3 Bagian Penutup**

Dalam pembicaraan bagian penutup laras pidato ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa tidak semua teks laras pidato memiliki penutup. Sehubungan dengan itu, pada subbab ini hanya dicermati teks-teks laras pidato yang memiliki penutup.

Yang dimaksud dengan bagian penutup laras pidato adalah bagian yang mengakhiri laras pidato. Bagian penutup dapat berupa satu paragraf atau lebih. Bagian ini dapat berisi harapan, ajakan, permohonan, saran, dan simpulan. Namun, tidak semua teks ditutup dengan kelima macam jenis penutup itu. Bagian itu ada yang berisi, misalnya harapan saja, ajakan saja atau permohonan, dan salam penutup.

Salah satu contoh bagian penutup laras pidato itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

- (39) *Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya dengan mengucapkan “Bismillahhirohmanirrohim”, Pelantikan Calon Fasilitator Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Penyusunan Peta Kemiskinan Desa Hargowilis, Hargorejo Kecamatan Kokap” secara resmi kami nyatakan Dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita. Sekian terima kasih.*

Bagian penutup laras pidato di atas berisi simpulan, permohonan maaf, harapan, dan ucapan terima kasih. Pernyataan yang berisi simpulan direalisasikan oleh kata *demikianlah* dan disertai permohonan maaf. Bagian penutup laras pidato ditandai pula oleh kata *akhirnya* disertai ucapan “Basmalah” bahwa *Pelatihan Calon Fasilitator Pemberdayaan Keluarga dan Penyusunan Peta Kemiskinan Desa Hargowilis, Hargorejo Kecamatan Kokap secara resmi dibuka*. Bagian penutup masih dipertegas lagi dengan suatu harapan agar pelatihan tersebut diridhoi oleh Allah. Bagian penutup tersebut berisi harapan ditandai oleh kata *semoga*. Fungsi harapan pada bagian penutup laras pidato yaitu untuk menyampaikan suatu kegiatan agar menjadi kenyataan. Harapan tersebut dapat berasal dari penulis maupun dari masyarakat yang dikenai peristiwa atau keadaan yang dipaparkan dalam laras pidato. Dan, bagian penutup dipertegas lagi dengan ditandai oleh kata *sekitan* dan diikuti oleh salam penutup dengan ucapan *terima kasih*.

Berikut ini akan dipaparkan rincian masing-masing jenis berdasarkan isi dari kegiatan penutup laras pidato.

#### **2.2.3.1 Bagian Penutup Laras Pidato Berisi Harapan**

Dalam subbab ini hal yang berkaitan dengan pengertian harapan, fungsi harapan, dan ciri harapan. Yang dimaksud dengan harapan adalah sesuatu yang dapat diharapkan atau dapat juga berupa keinginan supaya menjadi kenyataan. Paragraf penutup laras pidato yang berisi harapan dapat dilihat pada contoh berikut.

(40) *Saya berharap ini dapat meningkatkan aktualisasi semangat kemandirian dan kebersamaan tersebut.*

(Sambutan Gubernur DIY pada Acara Pembukaan Rapat Kerja Komwil III Apeksi).

Fungsi harapan pada bagian penutup laras pidato, yaitu untuk menyampaikan suatu keinginan agar menjadi suatu kenyataan. Harapan tersebut dapat berasal dari penulis (dalam teks



ini Gubernur) maupun dari masyarakat yang dikenai peristiwa atau keadaan seperti yang dipaparkan dalam bagian pidato.

Bagian penutup yang berisi harapan dapat dilihat pada laras pidato yang berjudul "*Sambutan Gubernur DIY pada Acara Pembukaan Rapat Kerja Komwil III Apeksi*", pada bagian penutup tersebut terdapat pada paragraf sembilan (9). Harapan itu diungkapkan oleh satuan lingual *Saya berharap forum ini dapat meningkatkan aktualisasi semangat kemandirian dan kebersamaan tersebut*. Maksudnya, untuk mengatasi persoalan pengangguran, kriminalitas, kemerosotan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya perlu diambil kebijakan-kebijakan, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kota atau secara sektoral. Dalam konteks ini pula maka kemandirian dan kebersamaan menjadi sangat penting. Bagian penutup laras pidato yang berisi suatu harapan ditandai oleh kata *berharap*.

Contoh lain bagian penutup laras pidato yang berisi suatu harapan pada paragraf tujuh, seperti berikut.

- (41) *Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa senantiasa memberkahi kita semua, Amin. Wasalamualaikum Wr. Wb.* (Sambutan Ketua Komwil III Pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wil. III. Apeksi III Tahun 2003).

Bagian penutup laras pidato berisi harapan ditandai adanya pemakaian kata *semoga* dan diikuti oleh salam penutup *Wasalamualaikum*.

Contoh lain yang setipe di atas bagian penutup pidato yang berisi harapan pada paragraf enam seperti pada data berikut.

- (42) *Demikian beberapa hal kami sampaikan dan semoga forum ini dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sistem pemerintahan daerah di era sekarang. Terima kasih, Wasalamualaikum*  
(Sambutan Walikota Yogyakarta pada Rapat Kerja Komisariat Wil. III Apeksi).

Bagian penutup laras pidato berisi harapan terdapat pada paragraf keenam dan ditandai oleh kata *semoga* dan diikuti salam penutup berupa ucapan terima kasih dan salam *wasalamu-alaikum*.

### **2.2.3.2 Bagian Penutup Berisi Ajakan**

Dalam subbab ini dibicarakan hal yang berkaitan dengan pengertian ajakan, fungsi ajakan, dan ciri ajakan. Yang dimaksud dengan ajakan adalah mengajak semua orang untuk melakukan sesuatu. Bagian penutup laras pidato yang berisi ajakan dapat dilihat pada contoh berikut.

(43) *Demikian beberapa harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita memanfaatkan semaksimal mungkin forum rapat kerja yang akan kita laksanakan ini guna kepentingan masa depan kita bersama. (sambutan Ketua Komwil III Pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wil. III Apeksi Tahun 2003).*

Fungsi ajakan pada bagian penutup laras pidato yaitu menyampaikan suatu ajakan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan masa depan bersama. Ajakan tersebut berasal dari penulis pidato ditujukan kepada para undangan atau hadirin untuk melakukan sesuatu seperti contoh di atas. Bagian penutup laras pidato yang berisi ajakan terdapat pada paragraf ditandai oleh kata *marilah*. Ajakan itu diungkapkan oleh kalimat *Marilah kita memanfaatkan semaksimal mungkin forum rapat kerja*. Maksudnya, mengajak para undangan memanfaatkan forum rapat kerja agar dapat melakukan sesuatu untuk masa depan.

### **2.2.3.3 Bagian Penutup Berisi Permohonan**

Dalam subbab ini dibicarakan hal yang berkaitan dengan pengertian permohonan, fungsi permohonan, dan ciri permohonan.

Permohonan adalah permintaan seseorang kepada orang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk melakukan

suatu tindakan, misalnya, sambutan, membuka suatu kegiatan. Permohonan bagian penutup laras pidato dapat dilihat pada contoh berikut.

(44) *Pada kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah menjalin kerja sama dan menjadi mitra kerja dalam melaksanakan Program KB Nasional yang ada di Propinsi ini karena meskipun terdapat kekurangan di sana-sini, tetapi secara umum program-program yang telah kita rencanakan pada awal tahun dalam forum Rakerda dapat berjalan dan berhasil baik. Akhirnya, ke hadapan Bapak Gubernur mohon perkenannya untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka rapat ini secara resmi. Sekian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf, wasalamualaikum Wr. Wb.*

(Sambutan Kepala BKKBN Propinsi DIY pada Rapat Penelaahan Program KB Nasional Propinsi DIY.

Fungsi permohonan pada laras pidato, yaitu permohonan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan, seperti pada contoh bagian penutup laras pidato bahwa Kepala BKKBN sebagai pelaksana kegiatan meminta kepala gubernur (dalam hal ini gubernur dianggap sebagai orang yang lebih tinggi kedudukannya) untuk melakukan semua tindakan sesuai permintaan pemohon untuk mengarahkan kegiatan dan sekaligus membuka kegiatan. Dari pengamatan yang dilakukan, bagian penutup laras pidato yang berisi permohonan dapat berarti dengan pemakaian kata atau frasa *mohon perkenannya*. Contoh paragraf di atas, bagian penutup laras pidato ditandai pula oleh ucapan *terima kasih* yang disampaikan oleh Kepala BKKBN kepada para undangan kemudian Kepala BKKBN memohon kepada gubernur memberi pengarahan kepada peserta rapat dan sekaligus membuka rapat tersebut.

Contoh lain bagian penutup laras pidato yang setipe dengan contoh di atas seperti berikut.

- (45) *Marilah forum ini, saya mohon kesediaan Bapak Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan penghargaan dan menyampaikan sambutan Wakil Presiden sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VIII, Terima kasih. Wasalamualaikum w.w* (Menteri Pendidikan Nasional kepada Wakil Presiden RI dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII di Hotel Indonesia).

Berdasarkan data yang ada, bagian penutup laras pidato yang berisi permohonan ditandai oleh kata atau frasa *mohon kesediaanya*....kemudian diikuti oleh ucapan terima kasih dan diakhiri oleh ucapan *wasalamualaikum w.w*.

Selain itu, bagian penutup laras pidato ada yang berisi permohonan maaf, seperti terlihat pada contoh berikut.

- (46) *Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, Akhirnya dengan mengucapkan "Bismilahirrohmanirrohim", Pelatihan Penyusunan Tata Naskah Dinas dalam rangka Pengembangan Model Pengolahan Informasi Pembangunan Kabupaten Kulonprogo, secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita.*  
(Sambutan Bupati Kulon Progo)

Data yang di atas menunjukkan bahwa bagian penutup laras pidato ditandai oleh kata demikian dan diikuti permohonan maaf berupa frasa *mohon maaf*. Kemudian baris berikutnya diikuti oleh kata *akhirnya* sebagai tanda bagian penutup laras pidato dengan mengucapkan "Basmallah" pelatihan penyusunan Tata Naskah Dinas dalam Rangka Pengembangan Model Pengolahan Informasi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo resmi dibuka. *Wasalamualaikum Wr.Wb*.

### 2.3 Bagian Akhir

Yang disebut dengan bagian akhir atau bagian tertanda ialah unsur naskah pidato yang tidak termasuk dalam bagian tubuh. Bagian ini berupa tanda tangan dan nama yang berpidato atau yang berhak mengeluarkan teks pidato, bukan pembuat teks pidato. Jadi, nama dan atau tanda tangan yang dibubuhkan pada bagian akhir ini ialah nama yang berpidato atau yang berhak mengeluarkan teks pidato. Di samping itu, pada bagian akhir ini dapat disertakan jabatan yang bertanggung jawab atas teks pidato yang bersangkutan, kota, tanggal, dan cap.

Dari hasil pengamatan atas data yang diperoleh, bagian akhir dapat berupa sebagai berikut.

- a. Berunsur: nama

Contoh (47)

a. *Untung Budiono*

b. *Prof. Drs. A. Malik Fajar, M.Sc.*

- b. Berunsur: jabatan

Contoh (48)

*Bupati Kulon Progo*

- c. Berunsur: nama + jabatan

Contoh (49)

a. *Bupati Kulon Progo*

*H. Toyo Santosa Dipo*

b. *Walikota Yogyakarta*

*H. Herry Zudianto*

- d. Berunsur: nama + jabatan + tanda tangan

Contoh (50)

a. *a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN  
UMUM*

*(tanda tangan)*

*PROGO NURJAMAN*

- b.

*Kepala,*

*(tanda tangan)*

*dr. Siswatiningsih, SU*

*NIP. 140057831*

- e. Berunsur: nama + jabatan + cab + kota beserta tanggal  
Contoh (51)
- a. *Yogyakarta, 25 Oktober 2003*  
*GUBERNUR*  
*DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*  
*(...cap...)*  
*HAMENGKU BUWONO X*
  - b. *Yogyakarta 16 Juli 2003*  
*GUBERNUR*  
*DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*  
*(...cap...)*  
*HAMENGKU BUWONO X*
  - c. *SEMARANG, JULI 20*  
*KOMISARIAT WILAYAH III APEKSI*  
*KETUA*  
*(...cap...)*  
*H.SUKAWI SUTARIP, SH*

## **2.4 Rangkuman Struktur dan Fungsi Wacana Pidato**

Wacana pidato merupakan wacana yang memiliki bagian-bagian dengan fungsi yang khas. Berdasarkan data dan pembahasan tersebut, wacana pidato dalam bahasa Indonesia dapat digambarkan seperti pada tabel 3 berikut.

**TABEL 4 Rangkuman Struktur dan Fungsi Wacana Pidato**

|   | BAGIAN | SUBBAGIAN           | FUNGSI                     | BENTUK LINGUAL                                   |                       |
|---|--------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|   |        |                     |                            | substansi                                        | data                  |
| 1 | AWAL   | a. Sapaan           | membuka komunikasi         | a. agama                                         |                       |
|   |        |                     |                            | b. umum                                          |                       |
|   |        | b. Salam Pembuka    | menyapa mitra komunikasi   | a. nama                                          |                       |
|   |        |                     |                            | b. jabatan                                       |                       |
|   |        |                     |                            | c. nama+ jabatan                                 |                       |
|   |        |                     |                            | d. urutan                                        |                       |
| 2 | ISI    | a. Paragraf Pembuka | a. mengawali informasi     | a. latar belakang<br>b. permintaan izin mewakili |                       |
|   |        |                     | b. mengawali permasalahan  |                                                  |                       |
|   |        |                     | c. mengawali isi           |                                                  |                       |
|   |        |                     | d. pemberitahuan           | - pemberitahuan                                  |                       |
|   |        |                     | e. selamat datang          | - terima kasih atas kehadiran                    |                       |
|   |        | b. Paragraf Isi     |                            |                                                  |                       |
|   |        | b1. informatif      | a. menyampaikan pernyataan | - informasi                                      | Bentuk-bentuk kalimat |
|   |        |                     | b. memberitahukan          | - pengumuman                                     |                       |
|   |        |                     | c. menjelaskan             | - penjelasan                                     |                       |
|   |        | b2. persuasif       | a. mengajak                | - ajakan                                         |                       |
|   |        |                     | b. mengharapkan            | - harapan                                        |                       |
|   |        | b3. rekreatif       | a. kongratulasi            | - ucapan selamat                                 |                       |
|   |        |                     | b. ikut gembira            | - penghargaan, sanjungan                         |                       |
|   |        |                     | c. peresmian               |                                                  |                       |
|   |        | c. Paragraf Penutup |                            | - terima kasih, salam, doa                       | - demikian...         |
|   |        |                     |                            | - mohon maaf                                     | - akhirul...          |
| 3 | AKHIR  |                     | Salam Penutup              | - terima kasih, salam,                           |                       |

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari pembahasan laras naskah pidato pejabat dalam tulisan ini, dapat dikemukakan beberapa simpulan seperti berikut.

#### **3.1 Simpulan**

- 1) Yang dimaksud dengan naskah pidato pejabat pemerintah adalah naskah yang disusun dengan tujuan untuk dibacakan oleh pejabat pemerintah pada acara yang bersifat resmi. Dalam hal ini naskah pidato merupakan sarana komunikasi yang amat penting antara pemerintah (yang diwakili oleh pejabat) dengan masyarakat (publik, peserta, partisipan, hadirin, atau pihak-hak yang berpentingan). Sebagai naskah yang akan dibacakan oleh pejabat pemerintah dalam acara resmi, tentu naskah pidato disusun dengan struktur tertentu.
- 2) Penelitian terhadap pemakaian bahasa Indonesia pada naskah-naskah pidato pejabat ini dilakukan karena hasilnya dapat dimanfaatkan bagi upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini berupa deskripsi struktur dan kekhasan ungkapan pada setiap bagian naskah pidato.
- 3) Naskah pidato yang dijadikan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi di DIY, dengan penambahan satu teks pidato dari pusat sebagai bahan pemerlengkap, yaitu naskah pidato menteri, dan dua data pendukung dari teks pidato tingkat RW.



- 4) Sehubungan dengan bagian teks pidato, dapat dikemukakan bahwa sebuah teks pidato memiliki tiga bagian, yaitu (i) bagian awal, (ii) bagian tubuh, (iii) bagian akhir, yang terinci lagi sebagai berikut.
- (i) Bagian awal terbagi menjadi (a) sapaan dan (b) salam (fatis) pembuka.
  - (ii) Bagian tubuh terbagi menjadi (a) bagian pembuka, (b) bagian isi, dan (c) bagian penutup.
  - (iii) Bagian akhir atau bagian tertanda.

Bagian struktur naskah pidato terurai pada subbab (2.0).

- 5) Bagian awal ialah unsur teks pidato yang terletak di awal teks dan berfungsi untuk menjalin kontak dengan mitra bicara. Bagian ini dibangun oleh dua unsur, yaitu salam fatis dan sapaan. Berdasarkan urutan unsur-unsurnya, bagian awal teks pidato dapat dibedakan menjadi dua pola, yaitu (i) salam fatis + sapaan dan (ii) sapaan + salam fatis.
- 6) Bagian tubuh teks pidato terbagi menjadi tiga, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.
- (a) Bagian pembuka laras pidato merupakan bagian pengantar untuk menyampaikan isi pidato.
  - (b) Bagian isi merupakan inti pidato. Bagian ini berisi uraian atau rincian pidato. Bagian isi dapat dipilah menjadi: (i) pernyataan informatif, (ii) pernyataan persuasif, dan (iii) pernyataan rekreatif. Namun, pada kenyataannya (menurut pengamatan yang dilakukan atas data), ketiga jenis isi itu terealisasi ke dalam beberapa jenis pernyataan berdasarkan kebutuhan. Jenis pernyataan tersebut ialah latar belakang, permasalahan, persoalan, dasar pemikiran, target (tuntutan, keinginan), dukungan, imbauan (permohonan, ajakan), instruksi, solusi (pendapat), pemikiran atau antisipasi, kemanfaatan, simpulan, pengumuman atau penawaran, harapan (nasihat), pernyataan rekreatif (yang

terdiri atas pernyataan “penghargaan”, pernyataan “selamat”, dan pernyataan untuk “menyambut”).

- 7) Yang dimaksud dengan bagian penutup laras pidato adalah bagian yang mengakhiri laras pidato. Bagian ini dapat berisi harapan, ajakan, permohonan, saran, dan simpulan.
- 8) Bagian akhir atau bagian tertanda ialah unsur naskah pidato yang tidak termasuk dalam bagian tubuh. Bagian ini berupa tanda tangan dan nama yang berpidato atau yang berhak mengeluarkan teks pidato, bukan pembuat teks pidato. Unsur yang terdapat pada bagian akhir ini ialah nama, jabatan, tanda tangan, cap, kota beserta tanggal.

### 3.2 Problematik dan Saran

- 1) Dalam pencarian data ditemui kendala yaitu adanya kesulitan dalam birokrasi perizinan pada instansi-instansi yang bersangkutan untuk mengeluarkan contoh teks pidato. Kami belum dapat mengatasi kendala pencarian data yang birokratif.
- 2) Pada penelitian ini belum dapat dibahas hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan kebahasaan yang terdapat dalam naskah, seperti penulisan kata/istilah asing dan daerah. Contoh penulisan kata asing dan daerah yang belum diserap dalam sistem fonem dan kosakata bahasa Indonesia yang tidak ditulis miring (*italic*):

Tertulis

step by step

self training

ngulir budi

Seharusnya

*step by step*

*self training*

*ngulir budi*

- 3) Penelitian ini pasti masih memiliki kerumpangan, di antaranya seperti yang dikemukakan pada butir (1) dan (2) di atas. Oleh karena itu, sangatlah baik jika dilakukan penelitian

lanjutan yang berguna untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baryadi, I. Praptomo. 2002. *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondosuli.
- Ehrlich, Eugene & Gene R. Hawes. 1985. *Komunikasi Lisan: Teknik Berbicara yang Membawa Anda ke Jenjang Sukses*. Semarang: Dahara Prize.
- Hendrikus, Dori Wuwur. 1991. *Retorika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Keraf, Gorys. 1997. *Komposisi*. Cetakan XI. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Luxemburg, Jan van dkk. 1984. *Pengantar Ilmu Sastra*. Diterjemahkan oleh Dick Hartoko. Jakarta: PT Gramedia.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Retorika Modern: Pendekatan Praktis*. Bandung: Penerbit PT Rosda Karya.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik Bagian Pertama: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 1988a. *Metode Linguistik Bagian Kedua: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 1990. *Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- , 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wiyanto, Asul. 2001. *Terampil Pidato*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

## **LAMPIRAN**

Berikut ini lampiran yang berupa teks-teks pidato. Naskah pada lampiran ini merupakan hasil pengetikan ulang dari naskah pidato yang asli maka wujud tanda tangan penanggung jawab tidak terlihat. Naskah ini digunakan untuk mempermudah atau membantu di dalam analisis, terutama pada pengecekan urutan kalimat dan paragraf .

### **DATA 1**

**SAMBUTAN BUPATI KULON PROGO  
PADA ACARA  
PEMBUKAAN PELATIHAN  
PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MODEL  
PENGOLAHAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
KABUPATEN KULON PROGO**

**Wates, 29 Juni 2005**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang Kami Hormati

- Bapak Kepala Balai Bahasa Yogyakarta
- Sdr-sdr. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Bapak – ibu tamu Undangan dan para tutor
- Hadirin peserta pelatihan yang berbagahagia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Alhamdullilah ke hadirat Allah SWT, bahwa atas ridho dan limpahan rahmat-Nya kita se-

kalian dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam acara “Pelatihan Penyusunan Tata Naskah Dinas dalam rangka Pengembangan Model Pengolahan Informasi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo”, dalam keadaan sehat walafiat.

Selaku pimpinan di jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami menyambut baik serta menyampaikan terima kasih kepada Balai Bahasa Yogyakarta dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo atas kerja samanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dengan harapan kerjasama ini dapat berlanjut dan berkesinambungan di masa-masa mendatang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pula kepada para tutor dan segenap peserta atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Melalui pelatihan ini, kami berharap dapat menjadi sarana penyamaan persepsi, tentang penggunaan bahasa Indonesia secara tekstual yang baik dan benar, khususnya dalam penyusunan tata naskah dinas dalam rangka pengembangan model pengolahan informasi pembangunan. Ke depannya, dengan dimilikinya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar terutama dalam tata naskah dinas ini, tentunya akan mempermudah dalam proses pengolahan dan penyebarluasan informasi, baik internal lembaga itu sendiri maupun antarkomponen perangkat pemerintah guna mengimplementasikan program-program operasional pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lebih jauh lagi diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kinerja di kalangan aparat Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo ini. Mudah-mudahan upaya kita bersama dalam penataan sistem administrasi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui kegiatan ini, akan dapat semakin memperlancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan bersama ini.

Hadirin yang Kami hormati

Sudah menjadi konsekuensi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam kebijakannya untuk mewujudkan peningkatan administrasi pemerintahan, dalam hal ini pelaksana administrasi khususnya unsur kesekretariatan memegang peranan penting, sama dan sederajat pentingnya dengan pelaksana yang lain dalam lingkungan kerja masing-masing. Bahkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan, pelaksana administrasi khususnya naskah kesekretariatan memegang peranan yang sangat menentukan bagi kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan.

Sementara itu, berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah maka pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi penanaman modal antara lain merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Namun demikian harus kita akui bahwa pengembangan dan pengolahan informasi pembangunan hingga dewasa ini belum seragam dan optimal sebagai landasan pembuatan kebijakan.

Di sisi lain dengan kompleks dan dinamisnya kegiatan administrasi pemerintahan, semakin menuntut adanya pengelolaan informasi yang tepat dan sistematis yang dalam waktu singkat akan dimanfaatkan sebagai acuan pengambilan keputusan. Mengingat hal tersebut sangatlah diperlukan adanya komitmen yang sama terhadap pemahaman dan kesepahaman mengenai manfaat dan fungsi pengelolaan administrasi, di samping struktur, format yang tepat dan sesuai dengan ketugasan dan fungsi tata naskahnya. Oleh karena itu, kami menilai kegiatan ini memiliki manfaat dan andil yang besar dalam kelancaran proses administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sehingga kegiatan seperti ini, kami harapkan dapat harus berlanjut dan dikembangkan, tidak hanya untuk tata naskah dinas, namun juga naskah-naskah atau materi yang lain. Kepada para peserta, kami harapkan dapat mengikuti pelatihan

ini hingga selesai nanti. Selamat mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim”. Pelatihan Penyusunan Tata Naskah Dinas dalam rangka Pengembangan Model Pengolahan Informasi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, secara resmi kami nyatakan DIBUKA. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita.

Sekian – terima kasih  
*Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.*

BUPATI KULON PROGO

*H. Toyo Santoso Dipo*

DATA 2

SAMBUTAN BUPATI KULON PROGO  
PADA ACARA PELATIHAN  
CALON FASILITATOR PEMBERDAYAAN  
KELUARGA MISKIN DAN PENYUSUNAN PETA  
KEMISKINAN DESA HARGOWILIS, DESA  
HARGOREJO, KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO

Wates, 14 Juni 2006

Assalamu'alikum Wr.Wb.  
Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang Kami Hormati,

- \* Bapak Ketua Yayasan Cakra Kinarya Bangsa Jakarta
- \* Bapak Kepala Pusat Studi Kependudukan UGM
- \* Bapak Kepala BKKBN Prop. DIY
- \* Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
- \* Sdr. Kepala Dinas Instansi Terkait Kab. Kulon Progo
- \* Sdr. Utusan Muspida Kecamatan Kokab.



- \* Bapak Ibu Tamu Undangan
- \* Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur “*Alhamdulillah*” kehadiran Allah SWT, bahwa atas ridho dan limpahan rahmat-Nya kita sekalian dapat berkumpul dan bersilaturahmi di Kantor KUD Rejeki Mulya Kkecamatan Kokap ini dalam rangka **“Pelatihan calon Fasilitator Pemberdayaan keluarga Miskin dan Penyusunan Peta kemiskinan Desa Hargowilis, Desa Hargorejo Kecamatan Kokab”**, dalam keadaan sehat walafiat.

Atas nama jajaran Pemerintah dan selaku yang dituakan di wilayah kabupaten Kulon Progo, kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya pelatihan calon fasilitator ini sebagai wujud nyata dalam pemberdayaan keluarga miskin dan penyusunan peta kemiskinan khususnya Desa Hargowilis dan Hargorejo Kecamatan Kokap. Dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Yayasan Cakra Kinarya Bangsa Jakarta, Pusat Studi Kependudukan UGM Yogyakarta dan BKKBN Propinsi DIY serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.

Program ini merupakan program bersama antara Pemda Kabupaten Kulon Progo dengan Yayasan Cakra Kinarya Bangsa Jakarta, dengan materi pemberdayaan keluarga miskin dan penyusunan peta kemiskinan yang akan dilaksanakan di Desa Hargowilis dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.

### ***Hadirin yang kami hormati***

Sudah menjadi konsekuensi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam kebijakannya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat, termasuk di dalamnya kesejahteraan ekonomi keluarga dan pemetaan keluarga miskin di Kecamatan Kokap. Program ini sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang mengutamakan kemandirian dan bertumpu pada kekuatan sendiri

untuk senantiasa kerja keras “Ngulir Budi” baik di bidang pelatihan (*Self Training*), permodalan, perencanaan, pemberian insentif fasilitator dengan melalui penggalian potensi daerah ataupun sumber daya, kearifan dan kreativitas lokal. Janganlah pemerintah dijadikan terus menerus untuk senantiasa memberikan bantuan, akan tetapi usahakanlah agar dapat berdiri di atas kaki sendiri dan berjalan *step by step* guna mencapai kesejahteraan bersama. Kita ketahui bersama bahwa kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Adapun hak-hak dasar (**Basic Human Rights**) tersebut antara lain meliputi: Hak atas kecukupan dan mutu pangan, hak mendapat layanan kesehatan yang bermutu, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, hak mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usaha, baik untuk mendapatkan layanan perumahan dan sanitasi, hak untuk mendapatkan air bersih, baik atas kepemilikan dan penguasaan tanah, hak untuk terbebas dari memburuknya lingkungan hidup dan sumber alam, baik mendapatkan jaminan rasa aman, hak berpartisipasi, hak untuk mengatur kehamilan dan kelahiran dan baik untuk terbebas dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Sejalan dengan hal itu implementasi kebijakan pembangunan secara nyata dalam pemberdayaan keluarga miskin dan penyusunan peta kemiskinan. Dengan langkah ini diharapkan dalam waktu yang relatif singkat keluarga miskin kecamatan Kokap akan menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang berarti. Hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatsn SDM yang merupakan modal dasar untuk membangun di segala bidang melalui pendidikan dan ketrampilan baik formal maupun non formal. Untuk itu kiranya perlu menyukkseskan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kokap. Selain itu, bantuan **Wartel net** yang diberikan Yayasan Cakra Kinarya Bangsa Jakarta me-

upakan sarana yang tepat membuka jendela lebar-lebar agar informasi terkini yang terjadi di dunia dapat ditangkap oleh masyarakat Kokap, yang pada akhirnya masyarakat akan meningkatkan pengetahuannya. Selanjutnya setelah pelatihan ini selesai para peserta haruslah segera bekerja keras untuk menyusun peta keluarga miskin di desa masing-masing guna merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor antara lain:

- Kesehatan/Kartu Sehat
- Pendidikan/Beasiswa
- Bantuan Sosial/Fasilitas Raskin
- Ekonomi /Usaha Kecil

Untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, idealnya setiap keluarga mempunyai sumber penghasilan jangka pendek (harian), jangka menengah (bulanan) dan jangka panjang (tahunan). Apabila model ini dapat diterapkan maka kiranya akan semakin meningkat. Agar supaya program ini dapat berhasil, kiranya perlu kerja keras, ketulusan dan kesungguhan hati dari semua pihak terkait. Selanjutnya kami minta saudara Camat Kokap bersama seluruh “*Stakeholder*”, pengusaha, pedagang dengan seluruh komponen masyarakat Kecamatan Kokap untuk bahu membahu berkoordinasi, bekerjasama demi suksesnya program ini. Dan, janganlah lupa senantiasa berdoa memohon petunjuk dan rahmat Tuhan YME. Hambatan pasti ada, hadapi dan pecahkan secara bijak dan proporsional serta jangan mudah putus asa. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.

Akhirnya dengan mengucap “**Bismillahirrohmanirrohim**”. **Pelatihan Calon Fasilitator Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Penyusunan Peta Kemiskinan Desa Hargowillis, Hargorejo Kecamatan Kokap, secara resmi kami nyatakan DI-BUKA.**

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita.

Sekian-terima kasih  
**Wassalamu'alikum Wr.Wb.**

## **BUPATI KULONPROGO**

### **DATA 3**

Data C, D  
WALIKOTA YOGYAKARTA

---

(C)

#### **SAMBUTAN PADA PENUTUPAN RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI TAHUN 2003**

Tanggal, 17 Juli 2003

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Dewan Pengurus APEKSI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pekenan-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka Penutupan Rapat Kerja KOMWIL III APEKSI Tahun 2003.

Dalam hubungan itu, ijinkanlah kami mengucapkan syukur atas berbagai kesepakatan yang telah berhasil kita rumuskan dalam rapat kerja ini, yang pada intinya adalah sebagai jawab guna meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan, bersinergi guna lebih memperteguh komitmen kita merealisasikan Program Kerja Komisariat Wilayah III APEKSI Tahun 2002-2004, guna terwujudnya keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 1999.

Kiranya kita sepakat, bahwa agar apa yang diamanatkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 itu akan manives ke alam wujud manakala atmosfer

yang melingkupi segala kebijakan atau *political will* dan *good will* pemerintah daerah mengedepankan daya-upaya guna peningkatan pemberdayaan, bukan pemerdayaan masyarakat.

Sebagaimana kita pahami, sebenarnya istilah pemberdayaan (empowerment) tidak asing lagi di kalangan aparatur pemerintah. Ia muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran perlunya partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan.

Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan merupakan sebuah kewajaran harus mampu memotivasi proses kemandirian masyarakat. Ada hipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses kemandirian tersebut. Tanpa adanya kemandirian, maka bentuk partisipasi masyarakat itu tidak lain adalah proses mobilisasi belaka. Namun demikian, kemandirian itu sendiri sesungguhnya tidak akan menjelma ke alam wujud apabila proses pemberdayaan tidak disosialisasikan sebagaimana mestinya.

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, aparatur daerah sebagai salah satu sosok pemberdaya jelas berperan sentral. Dan, pemberdaya merupakan sebuah kemestian merupakan sosok-sosok pembebas sebagai actor yang memayungi semua masyarakat dengan segala komponennya secara adil dan merata dan menjauhkan perilaku diskriminatif, karena pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pembebasan manusia yang hanya bisa direalisasi oleh manusia dan institusi yang terjaga kualitas dan integritas dan independen. Di sisi lain, pemberdayaan sendiri sendiri harus sudah berdaya intelektual berpengetahuan dan sekaligus berdaya terampil tinggi untuk untuk berkiprah-nyata di lapangan, berkaya dengan nurani dan empati, serta dengan rasa takut yang besar terhadap penyimpangan beta-papun kecilnya.

Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan segala jajarannya merespon dengan positif dan bertekad meningkatkan kerja sama antar daerah guna semakin meneguhkan peran KOMWIL III APEKSI baik secara internal dan eksternal. Demi-

kian pula tak kalah pentingnya agar KOMWIL III APEKSI mampu merumuskan dan menyamakan persepsi guna mencari penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasaka aspirasi dan kepentingan daerah. Sebagai ilustrasi kiranya dapat diagendakan tentang kewenangan pertanahan yang hingga detik ini belum semuanya diserahkan ke Daerah. Sebagaimana kita alami untuk kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat ditangani Pusat, sementara yang untuk ijin lokasi diserahkan ke Daerah. Akibat yang dirasakan oleh kita semua pada proses pelimpahan tersebut berkesan ada tarik ulur antara pusat dengan Daerah. Dan kiranya hal tersebut merupakan keprihatinan yang masih kita rasakan bersama. Mengapa? oleh sebab secara ideal, desentralisasi adalah lebih bisa menitikberatkan pelimpahan kekuasaan negara terkecuali pada hal-hal yang sifatnya khusus dan vital. Sekali lagi kami mengingatkan akan pentingnya peningkatan frekuensi dan intensitas kerja sama guna memecahkan dan mengantisipasi potensi-potensi yang bisa menghambat aktivitas pemerintahan khususnya dalam berbagai bidang pelayanan.

Bapak/ibu dan Saudara-saudara Yth.

Kiranya kita sepakat, agar amanat UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjelma ke alam wujud, mensyaratkan terbangun kokohnya keterkaitan hubungan yang saling membantu di antara kita. Kami mempunyai harapan besar, perembungan kita lebih lanjut semakin meneguhkan jiwa dan semua APEKSI yang komunikatif-dialogis, dan aspiratif atas kepentingan daerah.

Akhir kata, sekali lagi melalui lembaga yang strategis ini kami menyampaikan permohonan maaf dan atas berbagai kekurangan kami sebagai tuan rumah dalam membantu memberikan fasilitas pada Rapat Kerja KOMWIL III APEKSI tahun 2003 di kota kami tercinta Yogyakarta. Kami mengucapkan sela-

mat jalan, dan semoga kita benar-benar membawa kesepakatan-kesepakatan buah Rapat Kerja APEKSI KOMWIL III 2003 ke alam wujud guna semakin tertingkatnya keseimbangan kesejahteraan masyarakat kita masing-masing. Selamat jalan, dan selamat bekerja.

Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

## DATA 4

### SAMBUTAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA RAPAT PENELAAHAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2003

25 Oktober 2003

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Hadirin sekalian Yth.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat Penelaahan Program KB Nasional Tahun 2003.

Setelah kita ikuti bersama laporan dari Kepala BKKBN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu hal yang penting untuk kita cermati bersama khususnya tentang angka kelahiran tahun 2003 yang dilaporkan meningkat tajam dari 1,43 di tahun 2000 menjadi 1,9. Kenaikan ini apabila berlangsung secara terus-menerus lambat-laun akan sangat berpengaruh khususnya dalam konteks membangun keluarga sejahtera. Kalupun dalam skala nasional kenaikan angka kelahiran juga ada, namun sekarang ini kita memang harus berpikir lebih arif, terutama dalam konteks pembangunan di bidang sosial ekonomi, yang sebaiknya memang tanpa harus dihadapkan pada masalah pengaturan kelahiran.

Hal ini penting untuk kami sampaikan sebab bagaimanapun juga jumlah penduduk yang meningkat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan di bidang sosial ekonomi.

Program Keluarga Berencana selama ini berjalan dengan baik atas dukungan dari seluruh lapisan masyarakat termasuk juga peran serta penyuluh KB. Untuk kondisi sekarang ini meskipun kita dihadapkan kepada upaya pengaturan angka kelahir-



an, namun secara terus-menerus kita diharapkan untuk dapat mengembangkan konsep Good Family yang selama ini menjadi konsep dan komitmen pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami yakin bahwa keluarga yang berkualitas akan meningkatkan ketahanan bangsa dan negara kita.

Hadirin sekalian Yth,

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara nyata tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat diandalkan, namun di sisi lain kita memiliki potensi sumberdaya manusia yang sangat besar dan dapat dioptimalkan potensinya. Dan yang lebih membanggakan, hampir semua ini kehidupan dalam sektor formal maupun nonformal dapat menerima sumber daya manusia dari daerah kita, bahkan dalam skala tertentu SDM kita juga memiliki ketahanan yang cukup tinggi dan dapat terjun dalam persaingan di pasar global, serta mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Pengalaman menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara tidak selamanya dapat menggantungkan diri pada jaminan tersedianya sumber daya alam yang melimpah, namun lebih pada bagaimana kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Apalagi kalau sadar dengan adanya penerapan otonomi daerah ini, walaupun belum berjalan sebagai mana harapan kita karena memang dilapangan masih banyak hambatan untuk mengarah pada kesatuan pandang terhadap otonomi itu sendiri. Kita harus tetap optimis bahwa pelaksanaan otonomi daerah ini akan menjadi peluang bagi daerah untuk menggalang dan menggali potensi yang ada menjadi suatu kekuatan untuk mendorong terangkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sebelum kami mengakhiri sambutan ini kami mengharapkan khususnya kepada seluruh peserta rapat agar memanfaatkan kesempatan forum kajian ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa sumbang peran dan pemikiran yang positif dan aplikabel di-

harapkan dapat dimunculkan dalam forum ini. Sementara itu, berbagai program yang telah berjalan perlu dikaji kembali dan dievaluasi agar nantinya dalam pelaksanaan integrasi kelembagaan BKKBN dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaan program KB nasional akan semakin efektif dan efisien.

Demikianlah beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat penelaahan Program KB Nasional Tahun 2003 secara resmi kami nyatakan dimulai.

Terimakasih

Wasalammu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2003

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## DATA 5

WALIKOTA YOGYAKARTA  
SAMBUTAN PADA RAPAT KERJA  
KOMISARIAT WILAYAH III  
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH  
INDONESIA (APEKSI) TAHUN 20003  
Tanggal, 16 Juli 2003

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenan-Nya, sehingga kita masih mendapat kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2003. Atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, menghaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan, Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara kegiatan yang strategis ini. Mudah-mudahan suasana Yogyakarta semakin memberikan pencerahan bagi berlangsungnya pertemuan ini.

Pelaksanaan otonomi daerah, sudah berjalan hampir tiga tahun. Dan dalam perjalanannya sudah banyak pengalaman yang dihadapi oleh daerah dalam mewujudkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Telah menjadi pemahaman kita bahwa secara umum aktivitas pemerintah ditunjukkan untuk meningkatkan derajat keharmonisan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pelayanan, baik bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta aspek-aspek yang lain sebagaimana diamanatkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dalam implementasinya daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang akan menjamin terwujudnya

akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi pemahaman umum harus mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan pelayanan.

Hadirin dan Saudara-saudara Yth.

Kiranya kita sama-sama merasakan di era globalisasi ini kadang menghadapi situasi yang penuh dengan pendadakan perubahan yang tiba-tiba dan kecenderungan ketidakteraturan di bidang birokrasi baik pada tataran koordinasi teknis hingga kebijakan. Situasi demikian bisa memberikan pengaruh terhadap bobot maupun kualitas kebijakan yang dihasilkan. Untuk mengantisipasinya kita tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bahkan merasa dengan kekuatan sendiri mampu menanggulangi atau memecahkan persoalan-persoalan itu. Artinya agar dapat memecahkan persoalan hingga hingga menjadi peluang apabila kita mampu membangun keterkaitan hubungan yang saling membantu secara sinergis, baik internal maupun eksternal.

Berkaitan hal tersebut, kami mempunyai harapan besar forum ini mampu merumuskan konsepsi-konsepsi yang mengarah pada terbangun dan terkedepannya strategi yang berorientasi **integrated approach** yang berkomponen **integrated teamwork** inovasi desentralisasi dan evaluasi. Harapan itu merupakan kewajaran, terlebih dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif. Artinya segala aktivitas pemerintah agar benar-benar merupakan cerminan dan tuntutan dan kepentingan rakyat dalam proses penyusunannya benar-benar secara optimal mampu mendukung tuntutan perubahan, sehingga perlu perencanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang sistematis, terstruktur dan komparatif. Untuk itu, melalui kesempatan ini forum dapat merumuskan hal-hal yang lebih dapat mensinergikan hubungan-

an antar kelembagaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Ini menjadi sangat penting mengingat kegiatan pemerintahan pada dasarnya melibatkan masyarakat, DPRD, dan pada pemerintah yang saling terkait dan terintegrasi. Demikian pula keinginan terbangunnya pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa mensyaratkan kesiapan pemerintah daerah untuk lebih transparan, efisien dan efektif sejak mulai dari identifikasi potensi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil dari pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Dan dalam merumuskan setiap kebijakan pemerintahan apapun secara maksimal menyerap aspirasi kebutuhan/kepentingan masyarakat. Konsekuensinya, suatu kemestian segera dapat dirumuskannya kembali mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Demikian beberapa hal kami sampaikan, dan semoga forum ini dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sistem pemerintahan daerah di era sekarang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIZNTO

## DATA 6

SAMBUTAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA  
KORWIL III APEKSI  
Tanggal 16 juli 2003

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Hadirin dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat kerja Komisariat Wilayah III APEKSI di Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin yang saya hormati,

Penerapan otonomi sekarang ini secara signifikan telah membawa perubahan-perubahan dan pembangunan di daerah-daerah. Suatu hal yang sangat positif adalah bahwa otonomi telah membangkitkan kesadaran tiap-tiap daerah untuk mengeksplorasi dan mengeksplotasi potensi yang dimiliki agar perekonomian daerah dapat berkembang secara optimal. Berangkat dari sini kemudian muncul kreativitas dan inovasi daerah-daerah yang terlihat dari berbagai program yang dilaksanakan agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan memberikan manfaat maksimal kepada daerah.

Di sisi lain otonomi juga sering dipersepsikan sebagai kompetisi. Persepsi ini menyebabkan tiap-tiap daerah berlomba-lomba melakukan ini usaha agar daerahnya dapat berkembang dan yang sering terjadi usaha-usaha ini masih banyak didorong oleh cara berfikir yang berorientasi pada daerahnya sendiri dan dilakukan dengan cara-cara yang instan yaitu dengan memperluas dan meningkatkan pajak atau retribusi. Upaya-upaya

strategis yang mempunyai jangkauan jauh ke depan masih belum banyak dilakukan.

Dalam era otonomi di samping kompetisi kooperasi merupakan sisi lain yang perlu dipacu agar keunggulan suatu daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan membangun *networking* dengan daerah lain. Sebaliknya kelemahan daerah dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi untuk memanfaatkan keunggulan daerah lain. Dengan demikian tidak selamanya kompetitor harus menjadi pesaing, namun pada bidang-bidang tertentu dapat pula menjadi dari bagian dari *networking* yang dibangun bersama. Sebab bisa saja efektifitas dari suatu usaha untuk meningkatkan perekonomian akan lebih produktif kalau dilakukan secara kolaboratif dengan daerah lain.

Pemikiran tersebut sangat penting karena di masa mendatang perkembangan ekonomi cenderung bersifat lintas batas negara/wilayah dimana aktifitas ekonomi melibatkan beberapa wilayah yang secara administratif berada pada daerah yang berbeda-beda. Dalam konteks ini maka keberhasilan suatu daerah tidak hanya semata-mata dilihat dari kemampuan daerah berkompetisi dengan daerah lain, namun bagaimana daerah dapat membangun *networking* untuk membangun kekuatan kolektif antar daerah agar dapat berkompetisi di tingkat global dan saling mendukung dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor global.

Dalam ekonomi yang sudah mengglobal, maka tiap-tiap daerah harus mempersiapkan diri memasuki arena global. Dalam bukunya *World Class*, Kanter menulis bahwa dalam lingkungan yang sudah mengglobal maka tiap-tiap daerah juga harus *“world ready, foreign, globally skilled dan partnership oriented”* dalam rangka menarik sumber daya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi daerah. Pemikiran tersebut semakin penting karena ke depan paradigma ideologis dalam hubungan internasional, sudah bergeser dan digantikan para-

digma ekonomi. Kondisi ini akan membawa pengaruh pada program persaingan atau kompetisi yang lebih ketat pada domain ekonomi, sehingga suatu region tidak akan lepas dari tarik-menarik pengaruh ekonomi dan kekuatan ekonomi yang akan menentukan kemampuan suatu daerah dalam kompetisi.

Hadirin yang saya hormati,

Pada saat ini kota-kota di Indonesia dapat dikatakan menjadi terminal dari persoalan-persoalan yang telah mengakumulasi sejak lama. Banyak fenomena berkaitan dengan itu dapat kita lihat seperti pengangguran yang semakin tinggi, kriminalitas, kemerosotan kualitas infrastruktur, pelayanan publik yang menurun dan rentetan permasalahan yang satu sama lain saling berkait dan semakin kompleks sehingga sulit diuraikan satu persatu. Persoalan-persoalan tersebut kalau tidak cepat diatasi akan menurunkan derajat keunggulan sebuah kota yang selama ini menjadi daya tarik utama dalam menarik sumber daya, baik itu berupa investasi, pariwisata, perdagangan, jasa dan lain-lainnya. Padahal kita mengetahui bahwa kota-kota di negara lain sudah berkembang demikian pesat dan mereka mampu melakukan langkah-langkah cepat sehingga sekarang sudah keluar dari krisis dan mulai menunjukkan kekuatan ekonominya dalam konteks pasar bebas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu diambil kebijakan-kebijakan, baik di tingkat nasional, di tingkat propinsi, di tingkat kota, atau secara sektoral. Dalam konteks ini pada kemandirian dan kebersamaan menjadi sangat penting. Tema ini akan bermakna kalau kemudian dapat dirumuskan sebuah action plan bersama yang didahului dengan pengkajian-pengkajian secara komprehensif dan mendalam.

Saya berharap forum ini dapat meningkatkan aktualisasi semangat kemandirian dan kebersamaan tersebut.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmaniromih, Rapat kerja



Komisariat Wilayah III APEKSI secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wasalammu'alaikum Wr.Wb.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 16 Juli 2003

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

## DATA 7

### DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI KEMANDIRIAN PEMERINTAH KOTA DALAM OTONOMI DAERAH Yogyakarta, 16 Juli 2003

Yth. Sdr. Gubernur DI Yogyakarta

Yth. Sdr. Para Walikota

Yth. Sdr. Direktur Eksekutif beserta jajaran Penggurus APEKSI.

Yth. Sdr. Para Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah.

Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alikum warohmatullohi wabarokaatuuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apapun. Kami merasa berbahagia karena dapat menghadiri Rapat Kerja KOMWIL III APEKSI di Yogyakarta dan memberikan paparan dengan tema "Kemandirian Pemerintah Kota dalam Otonomi Daerah" Saya menilai Rapat kerja ini mempunyai arti penting untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai isu strategis perkotaan yang semakin lama mempunyai permasalahan semakin kompleks, sehingga APEKSI sebagai wadah Pemerintah Kota harus selalu sanggup dan kreatif dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada tataran konseptual maupun implementasi.

Daerah perkotaan merupakan kutub-kutub pengembangan yang mempunyai posisi strategis di masa yang akan datang.

Secara politis dan ekonomis, kehidupan perkotaan merupakan barometer yang menentukan keberhasilan persaingan antar-bangsa dalam era globalisasi. Namun, di sisi yang lain, daerah perkotaan mempunyai permasalahan yang cukup kompleks dan spesifik dibandingkan dengan wilayah perdesaan karena daerah perkotaan identik dengan tingkat kegiatan manusia yang sangat dinamis dan modern. Permasalahan pengelolaan perkotaan semakin lama semakin kompleks karena menyangkut beragamnya stakeholder maupun kepentingan. Semakin tinggi tuntutan masyarakat perkotaan terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik, semakin berat beban yang harus dipikul oleh pemerintah Kota. Hal ini harus disadari benar oleh aparat Pemerintah Kota, sehingga mampu memberikan respon yang seimbang dengan keadaan tersebut, bahkan kalau bisa lebih maju dan modern daripada keadaan yang terjadi di masyarakat.

Di antara beberapa permasalahan Pemerintah Kota yang menonjol dapat diklasifikasi sebagai berikut.

a. Masalah Kelembagaan

Belum terdapat kesepakatan mengenai pelembagaan dari fungsi-fungsi pemerintahan kota. Pada umumnya fungsi-fungsi kota dilembagakan dalam dinas-dinas kota, namun kenyataan menunjukkan bahwa belum ada kriteria yang jelas di luar aspek legalitas yang dapat dijadikan pedoman untuk kelembagaan fungsi-fungsi tersebut. Akibatnya kota-kota dengan karakteristik yang relatif sama kemungkinan mempunyai jumlah dan jenis dinas yang berbeda, atau sebaliknya, kota-kota yang mempunyai banyak permasalahan kurang memiliki dinas untuk menanganinya.

b. Masalah Manajemen Pelayanan

Dari segi manajemen keuangan (*financial management*) masih terdapat adanya inefisiensi, *overhead cost* yang tinggi, ketidakpastian biaya yang dikeluarkan masyarakat (*clien*), kelembagaan pelayanan, dan ketidakmerataan pelayanan

sosial dan fasilitas sosial. Pelaksanaan fungsi sering diwarnai oleh tumpang tindih, kelembagaan pelayanan, perencanaan yang sering berubah sehingga menimbulkan ketidakpastian. Masalah-masalah ini terutama muncul dalam administrasi kependudukan, ijin bangunan, koordinasi pembangunan perkotaan, dan sebagainya.

- c. Masalah kerjasama Antar-daerah  
Luas wilayah suatu kota biasanya tetap, tetapi pertumbuhan penduduk dan aktivitas terus meningkat, sehingga suatu kota tidak dapat secara sendiri memenuhi perubahan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari kewalahan Pemerintah kota dalam penyediaan perumahan, pengaturan lalu lintas, dan penanggulangan masalah sampah kota. Misalnya, masalah TPA (Tempat Pembuangan Akhir), beberapa kota sudah tidak mempunyai ruang lagi bagi TPA sehingga harus bekerja sama dengan daerah sekitarnya. Dan beberapa kasus, tidak mudah dalam menjalin kerja sama antar-daerah karena berbagai kepentingan yang belum dapat diakomodir satu sama lain.
- d. Masalah Status Kota  
Masih belum jelasnya status perkotaan. Perkembangan permukiman yang cepat di *fring areas* perkotaan akhir-akhir ini telah banyak memunculkan kota-kota kecil dan menengah yang belum berstatus dan memerlukan pencegahan khusus. Perubahan yang cepat juga telah menyebabkan mekarnya kota-kota yang melewati batas-batas wilayah kota. Hal ini memerlukan adanya antisipasi perluasan wilayah kota dan kerja sama dengan hinterlands dalam berbagai aspek, seperti kependudukan, ekonomi/perdagangan, sosial, penyediaan jasa dan sebagainya.
- e. Masalah Partisipasi Masyarakat  
Masyarakat kota identik dengan masyarakat yang sangat

heterogen individualis (cenderung egois) dan materialis. Hal ini mengakibatkan relatif lebih sulit mengajak masyarakat perkotaan dalam pembangunan fisik maupun non fisik secara langsung. Harus dicari bentuk lain yang melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan gaya hidup masyarakat perkotaan modern.

Hadirin yang berbahagia,

Terkait dengan Otonomi Daerah, telah banyak ditafsirkan secara berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kuran keterbukaan telah dibuka lebar-lebar sehingga semua orang bisa dengan tenang berpendapat dan merasa benar terhadap pendapatnya sendiri. Demokrasi sering ditafsirkan dengan berdemo sebebaskan-bebasnya. Dalam bidang ketatanegaraan kita lihat masih terjadi kerancuan hubungan antara eksekutif dan legislatif sehingga menjurus saling tuduh dan menjerat. Dalam kehidupan berbangsa, sebagian kecil wilayah yang dimotori oleh gerombolan tertentu telah berusaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya potret kehidupan yang terjadi akhir-akhir ini akibat eforia otonomi daerah.

Otonomi Daerah sebenarnya merupakan suatu peluang sekaligus tantangan dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Peluang bagi daerah untuk sebesar-besarnya mengelola pemerintahan (*governance*) di daerahnya. Tantangan untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Tantangan dan peluang tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan bagaimana cara mengimplementasikan otonomi daerah sebaik-baiknya. Hal ini tentu menentukan strategi yang matang sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara harmonis (*in harmonia progression*).

Selama ini Otonomi Daerah baru diidentikkan dengan pengalihan kewenangan dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Padahal hakekat dari penyelenggaraan otonomi daerah

adalah mewujudkan kemandirian daerah yang berdampak pada kemampuan daerah untuk semakin produktif dan kompetitif. Kemandirian daerah yang tentunya masih sejalan dengan upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan rumusan strategi yang tepat untuk menjadikan pemerintah dan masyarakat semakin produktif, semakin kreatif, dan semakin kompetitif.

Banyak faktor-faktor yang mendorong suatu pemerintah daerah untuk semakin mandiri, diantaranya adalah

- a. Aparat Pemerintah yang trampil, tanggap terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- c. Kerja sama yang baik antara stakeholder yang terkait dengan pemerintahan, baik itu Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta.

Selain itu, untuk menuju kemandirian suatu daerah, sangat dibutuhkan adanya daya inovasi maupun terobosan-terobosan yang kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memecahkan kemandegan pembangunan suatu daerah, maupun untuk meningkatkan daya saing secara positif dengan daerah lain. Langkah-langkah cerdas dan berani dalam mencoba hal-hal yang sifatnya baru, meskipun langkah ini tetap harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat.

Hadirin yang terhormat,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun seluruh elemen masyarakat yang ada harus bersama-sama berupaya untuk mewujudkan langkah-langkah kemandirian tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Langkah-langkah yang mendorong adanya perubahan kebijakan publik dan institusi pemerintah kota ke arah yang lebih baik, memperhatikan peningkatan pelayanan responsif terhadap kebutuhan aspirasi masyarakat pada umumnya, serta kerja sama yang mendatangi-

kan kemanfaatan (*sibiosis mutualisme*) stakeholder yang ada di perkotaan. Untuk itu diperlukan dialog-dialog yang intensif dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada, baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan. Melalui dialog diharapkan dapat diperoleh berbagai pendapat yang bersifat membangun dan menyelesaikan permasalahan. Forum dialog yang konstruktif juga memungkinkan terjadinya saling pembelajaran di antara berbagai stakeholder.

Namun demikian, membangun kemandirian pemerintah kota bukan merupakan tugas yang mudah, bahkan dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sangat besar karena memerlukan kapasitas aparat maupun Pemerintah yang baik, dan melibatkan itikad yang baik oleh seluruh stakeholder kota. Peningkatan kapasitas aparat menyangkut perubahan mental yang cukup mendasar pada diri aparat tersebut untuk selalu berjiwa dan bersikap melayani masyarakat sebaik-baiknya. Aparat pemerintah kota sudah saatnya untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya sesuai dengan perkembangan dunia yang semakin cepat dan modern. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kota dapat juga berupa penyesuaian dengan perkembangan zaman dan merespon pasar. Hal ini mungkin membutuhkan tindakan-tindakan yang bersifat mendasar, seperti mengubah kebijakan, merevisi peraturan, maupun memperbaiki sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan selama masih dalam batasan-batasan yang dibenarkan, seperti dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparat dan pemerintah kota tersebut juga harus dibarengi dengan itikad yang baik oleh seluruh stakeholder kota, pihak-pihak yang tidak sekedar berpendapat “pemerintah pasti salah” namun hendaknya memberikan kontribusi yang nyata dan konstruktif bagi pembangunan kota keseluruhan. Bukan saatnya lagi untuk saling tuding dan mencari kambing hitam dalam keadaan krisis bangsa saat ini. Semua pihak harus berpikir keras, apa yang ter-

baik yang dapat saya berikan untuk perbaikan negeri tercinta ini.

Akhirnya, hendaklah kita semua sebagai stakeholder perkotaan harus kembali lagi kepada fungsi kita masing-masing dengan benar. Untuk Pemerintah Kota, pada kesempatan kali ini saya ingatkan kembali 3 (tiga) fungsi yang melekat padanya, yaitu

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service Function*)
2. Fungsi pembangunan (*Development Function*)
3. Fungsi Perlindungan Masyarakat (*Police Function*)

Fungsi pelayanan masyarakat berkaitan dengan kegiatan penyediaan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan air minum, sanitasi, lingkungan dan segalanya. Fungsi pembangunan mendudukan Pemerintah Kota sebagai *leading agent* kegiatan pembangunan di wilayahnya terutama untuk merangsang dan mengakomodasikan pertumbuhan ekonomi kota. Pemerintah Kota mendirikan pasar-pasar, mengeluarkan izin usaha, menyiapkan jaringan jalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang perekonomian perkotaan. Fungsi perlindungan masyarakat memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Kota untuk melindungi warganya baik dari gangguan alam maupun manusia. Tugas Pemerintah Kota adalah mengupayakan terciptanya ketiga fungsi pokok pemerintahan tersebut secara optimal.

Untuk itu, Departemen Dalam Negeri dalam berapa waktu terakhir ini memfasilitasi beberapa daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif dalam berbagai bidang seperti

- \* Pelayanan kepada masyarakat seperti: memperkenalkan produk perizinan yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan.
- \* Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- \* Pengelolaan lingkungan perkotaan



- \* Pengembangan ekonomi daerah
- \* Kerjasama antardaerah dan lain-lain

Hadirian sekalian,

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada acara ini. Semoga paparan ini dapat lebih mendorong semangat kita untuk menyelenggarakan pemerintahan kota di Indonesia secara lebih baik.

Sekian terima kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
PROGO NURJAMAN

## DATA 8

### Laporan Kepala BKKBN Propinsi DIY Pada Rapat Penetaahan Program KB Nasional Propinsi Daerah Istimwa Yogyakarta Tahun 2003

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Yang terhormat Bapak Gubernur DIY  
Yang kami hormati Bapak Muspida  
Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Propinsi DIY  
Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DIY  
Yang kami hormati Dan Lamud. Dan Lamud Propinsi DIY  
Yang kami hormati Bapak Bupati/Walikota Se DIY  
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas/Badan baik  
Propinsi maupun Kabupaten/Kota  
Yang kami hormati Mitra Kerja baik dari Perbankan, Organisasi  
Profesi dan LSOM.

Pertama kali kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT,  
atas Limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga kita sekalian  
dapat hadir di Gedung Radya Suyoso dalam keadaan sehat dan  
selamat untuk mengikuti Rapat Penelaahan Pelaksanaan Pro-  
gram KB Nasional sampai dengan September 2003.

Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur  
dan bapak ibu sekalian yang berkenan pada acara hari ini.

Rapat Penelaahan KB Nasional kali ini mempunyai arti dan  
makna yang sangat strategis karena dilaksanakan menjelang di-  
serahkannya sebagian kewenangan urusan bidang KB dari Pe-  
merintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan te-  
rima kasih kepada Bapak Bupati dan Walikota serta DPRD  
Kabupaten/Kota karena sebagian besar Kabupaten/Kota sudah  
menyiapkan kelembagaan yang nantinya akan memegang ke-

wenangan program Keluarga Berencana. Hal tersebut sangat penting mengingat strategisnya Program KB dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mewujudkan keluarga berkualitas.

Di sisi lain memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Propenas, serta Properda DIY (Perda Nomor 3 tahun 2002) BKKBN diberi tanggung jawab pokok untuk melaksanakan empat program:

1. Program Pemberdayaan Keluarga
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

Alasan lain mengapa Program KB masih harus dilanjutkan di DIY adalah adanya komitmen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia seperti Internasional Conference on Population and Development (ICPD) Cairo 1994 dan Beijing Platform for Action 1995 yang menyangkut isu-isu penting seperti hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan perempuan serta keadilan gender dan kesetaraan gender termasuk partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi.

DIY juga ditunjuk sebagai salah satu provinsi pengembangan yang antara lain sebagai lokasi studi Internasional Training Program bagi Negara selatan dan negara sahabat lainnya.

Bapak Gubernur dan bapak ibu sekalian yang berbahagia. Mengacu kepada rencana Program yang telah disusun pada awal tahun 2003, dapat kami laporkan hasil pencapaian Program sebagai berikut.

1. Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)  
Dari data yang dihimpun dari berbagai hasil sensus dan survei khususnya SDKI memberikan gambaran adanya trend penurunan TFR pada hasil Sensus dan SDKI sampai dengan tahun 1994, namun pada SDKI tahun 1997 dan 2002/2003

ada kecenderungan sedikit peningkatan. Sebagai gambaran, apabila pada Sensus 1971 TFR di DIY mencapai 4,775 maka tahun 1980 dan seterusnya mengalami penurunan, dari 3,415 menjadi 2,082 pada tahun 1990 dan 1,45 pada tahun 2000.

Sedangkan berdasarkan SDKI apabila tahun 1991 TFR 2,24 turun menjadi 1,75 pada tahun 1994 menjadi turun. Dari data dari tahun 2002-2003 ada sedikit penurunan dari 1,95 menjadi 1,90 pada tahun 2002-2003.

Walaupun kedua hasil sensus dan survei, metodologi maupun jumlah sampel berbeda namun ada kecenderungan sedikit peningkatan TFR pada tahun 2002/2003, perlu analisa lebih lanjut apa penyebabnya karena faktor yang mempengaruhi fasilitas cukup banyak

## 2. Angka Partisipasi Peserta KB

Kesertaan KB mempunyai dampak yang kuat terhadap penurunan fertilitas.

### a. Apabila kita melihat kesertaan KB

Hasil SDKI 1991 s/d 2002– 2003 ada kecenderungan meningkat, apabila 1991 kesertaan KB modern 57%, tahun 1994 59,7%, tahun 1997 (63,7%) maka tahun 2002–2003 ada sedikit penurunan, penggunaan kontrasepsi modern 0,5% menjadi 63,2% namun apabila dari seluruh jenis kontrasepsi kesertaan KB dari 72,9% pada tahun 1997 menjadi 75,6% pada tahun 2002-2003, sedangkan penggunaan kontrasepsi pria ada peningkatan dari 2,9% (SDKI 1997) menjadi 4% pada SDKI 2002-2003.

### b. Apabila kita melihat dari data statistik rutin BKKBN pada bulan September 2003 kesertaan KB sebesar

77,36% dari PUS sebesar 508.052 adapun penggunaan kontrasepsi non hormonal sebesar 173.003 (44,02%), sedangkan penggunaan kontrasepsi hormonal sebesar 220.049 atau 55,9%.

- c. Dari peserta KB tersebut kontrasepsi pria sebesar 23.528 atau 6.09%. Apabila dibandingkan dengan Desember 2002, secara absolut terhadap peningkatan peserta KB aktif dari 384.082 atau meningkat 2,34% sedangkan kesertaan KB pria secara absolut meningkat dari 23.513 pada bulan Desember menjadi 23.928 atau naik 1,76%.

### 3. Kesehatan Reproduksi Remaja

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku reproduksi remaja yang sehat dan bertanggung jawab berbagai kegiatan telah dilaksanakan antara lain KIR, diskusi KRR melalui kelompok sebaya di sekolah, kelompok sebaya di wilayah, pusat konsultasi remaja serta melalui 463 kelompok bina keluarga remaja.

### 4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dalam upaya memberdayakan keluarga khususnya keluarga pra sejahtera dan KSI, kita upayakan agar kelompok UPPKS yang jumlahnya 6.926 kelompok menurun  $\pm 10\%$  dibanding tahun 2002 karena penghentian pinjaman Kukesra dengan bunga ringan, perlu terus diupayakan agar usahanya tetap dapat berjalan dengan berbagai upaya, antara lain mengupayakan pinjaman kredit dengan bunga ringan baik lewat Pemda dan Perbankan mekanisme: operasional sejak dari Desa, kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.

Di samping keberhasilan Program KB Nasional yang dicapai sampai dengan bulan September 2003 masih banyak tantangan ke depan yang dihadapi antara lain:

1. Dengan kondisi kelembagaan yang menangani Program KB Nasional berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota dan seramping apapun kelembagaan yang ada diharapkan semua Kewenangan Program KB yang telah diserahkan ke Kabupaten/Kota dapat tertangani dengan baik oleh lembaga tersebut.
2. Dalam Era Reformasi dan Desentralisasi Pembangunan akan bertumpu kepada partisipasi dan peran serta masyarakat di pedesaan. Untuk itu Institusi Masyarakat Pedesaan yang selama ini menangani berbagai kegiatan Program KB Nasional baik PPKBD, Sub PPKBD, Kader UPPKS, BKB, BKR dan BKI, perlu lebih diberdayakan sehingga mampu dalam proses pengambilan keputusan dan pelembagaan Program KB Nasional di Pedesaan.
3. Keberadaan PKB/PLKB sebagai Penyuluh KB dan Pembangunan yang komprehensif di tingkat desa perlu terus diupayakan keberadaannya sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap Institusi Masyarakat di Pedesaan dapat terus dilaksanakan bahkan ditingkatkan dalam rangka pelembagaan program Pembangunan di desa.
4. Memperhatikan tantangan global maka masih diperlukan Peningkatan Kualitas Pelayanan KBKR yang memenuhi hak asasi manusia termasuk partisipasi pria.
1. Agar upaya membangun data base operasional Program Pembangunan di kabupaten/Kota dapat cepat terwujud diperlukan penyediaan *hard ware* dan petugas sampai dengan tingkat Desa/Kalurahan yang setiap saat dapat mengupdate, memonitor perubahan data keluarga yang ada di wilayahnya.

2. Mengantisipasi penyerahan sebagian kewenangan Program KB kepada Pemda Kabupaten/Kota diperlukan penyiapan SPM, Subsistem serta pedoman Pengelolaan Program KB tingkat Kabupaten/Kota.

Bapak gubernur dan bapak ibu sekalian yang kami hormati

Tujuan pertemuan hari ini disamping untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai, menginventarisasi permasalahan, juga menyusun program sampai dengan akhir tahun 2003 dan Rancangan Program KB di Era Otonomi.

Rapat Penelaahan tahun ini mengambil tema: ***“Dengan semangat desentralisasi kita mantapkan kesinambungan Program dan kelembagaan KB nasional dalam rangka pembangunan berkelanjutan”***. Sedangkan materi yang akan disajikan dan dibahas di samping materi baku evaluasi, juga akan disajikan Analisis Hasil SDKI tahun 2002 dari BPS Propinsi DIY, serta persiapan Pengintegrasian BKKBN Kabupaten dan Kota oleh Tim Otonomi Pemerintah Propinsi DIY. Untuk membahas materi tersebut, kami mengundang sebanyak 120 orang dari berbagai unsur baik pemerintah maupun LSM dan LSOM baik yang ada di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota, diharapkan pertemuan dapat diselesaikan pada pukul 15.00 WIB.

Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Pada kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah menjalin kerjasama dan menjadi mitra kerja dalam melaksanakan Program KB Nasional yang ada di Propinsi ini, karena meskipun terdapat kekurangan di sana-sini, tetapi secara umum program-program yang telah kita rencanakan pada awal tahun dalam forum Rakerda dapat berjalan dan berhasil baik.

Akhirnya kehadiran bapak gubernur mohon perkenannya untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka rapat ini secara resmi.

Sekian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala,

dr. Siswatiningsih, SU

NIP. 140057831



## DATA 9

KETUA KOMWIL APEKSI III  
SAMBUTAN KETUA KOMWIL III  
PEMBUKAAN RAPAT KERJA  
KOMISARIAT WILAYAH III APEKSI TAHUN 2003  
YOGYAKARTA, 16 JULI 2003

ASSALAMUALAIKUM WR.WB  
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA  
SEMUA

YANG TERHORMAT

1. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI YANG DIWAKILI OLEH DIRJEN PEMERINTAHAN UMUM BAPAK DRS. PROGO NURJAMAN.
2. BAPAK KEPALA BAPENAS ATAU YANG MEWAKILI
3. BAPAK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM HAL INI WAKIL KEPALA BPN. PROF. DR. MARIA SUMARSONO SH. MCL. MPA.
4. BAPAK DIRJEN ANGGA RAN DEP. KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIWAKILI OLEH KEPALA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA BAPAK DR. MULIA NASUTION.
5. BAPAK GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
6. BAPAK REKTOR UGM PROF. DR. SOFYAN EFENDI
7. SAUDARA PARA WALIKOTA ANGGOTA KOMWIL III APEKSI BESERTA JAJARANNYA.
8. SAUDARA KETUA DEWAN PENGURUS DAN DIREKTUR EKSEKUTIF APEKSI.
9. PARA TAMU UNDANGAN PESERTA RAKER YANG BERBAHAGIA.

SERAYA DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR  
ALHAMDULILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT TU-

HAN YANG ESA ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERI KESEHATAN DAN KEKUATAN KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA KITA DAPAT BERKUMPUL PADA KESEMPATAN PAGI YANG BERBAHAGIA INI DALAM RANGKA MENGHADIRI, RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI TAHUN 2003 YANG DI SELENGGARAKAN DI KOTA PERJUANGAN YOGYAKARTA. UNTUK ITU KAMI SELAKU KETUA KOMWIL III APEKSI DENGAN PENUH KETULUSAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BAPAK WALIKOTA YOGYAKARTA BESERTA JAJARANNYA YANG TELAH MENYIAPKAN DAN MELAKSANAKAN RAPAT KERJA KOMWIL III APEKSI INI DENGAN BAIK DAN PADA KESEMPATAN BAIK INI TAK LUPA KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DENGAN DILANTIKNYA BEBERAPA WALIKOTA YANG BARU ANTARA LAIN YAITU WALIKOTA SUKABUMI, WALIKOTA CIREBON, WALIKOTA BEKASI, WALIKOTA TASIKMALAYA. DI SAMPING ITU PULA PADA KESEMPATAN INI KOMWIL III APEKSI MENYAMBUT DENGAN RASA SYUKUR DENGAN BERGABUNGNYA KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI ANGGOTA BARU KOMWIL III APEKSI DENGAN DEMIKIAN JUMLAH ANGGOTA DARI 22 BERTAMBAH MENJADI 23 KOTA SEBAGAI KETUA KOMWIL SAYA BERHARAP BAHWA BEBERAPA DAERAH YANG SUDAH MENUNJUKKAN CIRI URBAN DAN DINAMIKA PERKOTAANNYA UNTUK BISA DI-REALISASIKAN PEMERINTAH KOTA.

HADIRIN DAN PESERTA RAKER YANG BERBAHAGIA

OTONOMI DAERAH YANG KINI TENGAH BERLANGSUNG AKAN BISA DIRASAKAN KEBERHASILANNYA APABILA DIIMBANGI BERBAGAI UPAYA KITA UNTUK MENTRANSFORMASIKAN SELURUH GA-

GASAN DAN KONSEP BARU DALAM MENATA ULANG STRUKTUR KULTUR. DAN MEMBANGUN SEBUAH SOSOK APARATUR SELAKU PENGELOLA PEMERINTAH KOTA DIMANA SELAIN HARUS MEMILIKI TINGKAT KAPASITAS ATAU KOMPETENSI DALAM BIDANGNYA JUGADIIMBANGIDENGANTINGKATAKUNTABILITAS DALAMPENGELOLAANKEPEMERINTAHAN KHUSUS- NYA PEMERINTAHAN KOTA YANG MEMILIKI NORMA SERTA SEJUMLAH PRASYARAT TERTENTU SEHINGGA KE DEPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MAN- DIRI DAPAT DIWUJUDKAN.

KEBERADAAN APEKSI SEBAGAI MEDIA BERHIMPUNNYA PEMERITAHAN KOTA MEMILIKI PERAN YANG SANGAT STRATEGIS DALAM MENGANTISIPASI TANTANGANPEMBANGUNANDALAMPERKEMBANGAN KOTA DIMASA DEPAN AKAN JAUH LEBIH KOMPLEK KARENA UNTUTAN GLOBALISASI DAN OTONOMI ITU SENDIRI PEMERINTAH KOTA DITUNTUT UNTUK BISA BERKOMPETISI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN KOTA. UNTUK ITULAH TEMA YANG DIAMBIL DALAM RAPAT KERJA INI ADALAH SANGAT SYARAT UNTUK DIBAHAS SEBAGAI TUNTUTAN PERKEMBANGAN MENEJEMEN KOTA.

UNTUK ITULAH SETIAP PEMERINTAH KOTA DITUNTUT DAPAT MENINGKATKAN KAPASITAS MENEJEMEN DAERAHNYA MASING-MASING SEHINGGA STRATEGI SETIAP PEMERINTAH KOTA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, MERUPAKAN SESUATU PRIORITAS PROGRAM YANG HARUS DILAKSANAKAN DAN TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR LAGI.

DENGAN DEMIKIAN APEKSI DIMINTA UNTUK BISA BERPERAN MAKSIMAL. DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BAIK DALAM PENGERTIAN YANG MELIPUTI KELEMBAGAAN KEUANGAN DAN MEKANISME SERTA PENGENDALIAN KEWENANGAN MAUPUN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIANYA.

MEMBANGUN ALIANSI STRATEGIS ANTAR KOTA YANG FASILITAS OLEH APEKSI DAN ATAU MASING-MASING KOMISARIAT WILAYAH KOMWIL ADALAH PENTING SEHINGGA SOSOK KOTA DI MASA DEPAN SELAIN AKAN DIKELOLA OLEH APARATUR YANG LEBIH PROFESIONAL JUGA BISA MEWUJUDKAN SOSOK KOTA YANG LEBIH MANDIRI. DEMOKRATIS BERKEADILAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SEHINGGA PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE LEBIH PROFESIONAL OLEH SETIAP PEMERINTAH KOTA HADIRIN PARA PESERTA DAN TAMU UNDANGAN.

DEMIKIANLAH BEBERAPA HARAPAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH KITA MANFAATKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN FORUM RAPAT KERJA YANG AKAN KITA LAKSANAKAN INI GUNA KEPENTINGAN MASA DEPAN KITA BERSAMA.

SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA SE-NANTIASA MEMBERIKAN KITA SEMUA. AMIN.

WASALAMU'ALAIKUM, WR. WR

SEMARANG, JULI 2003  
KOMISARIAT WILAYAH III APEKSI  
KETUA

H. SUKAWI SUTARIP, SH

**LAPORAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DALAM KONGRES BAHASA INDONESIA VIII**  
**DI HOTEL INDONESIA, JAKARTA**  
*14 Oktober 2003*

Yang terhormat Wakil Presiden RI yang diwakili  
Bapak Yusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Jenderal MPR dan DPR

Yang mulia para duta besar Negara sahabat,  
Yang berbahagia para pecinta bahasa Indonesia,

Assalamualaikum w.w.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini untuk secara bersama-sama mengikuti upacara pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII yang akbar ditempat yang mulia ini dalam rangka menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada bulan yang sama 75 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda pejuang bangsa untuk pertama kali mengikrarkan sumpah suci yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan kebangsaan kita yang, antara lain dimotori oleh Muhammad Yamin. Sepuluh tahun kemudian (1938) diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Selanjutnya, 16 tahun kemudian pada bulan yang sama pula atau 49 tahun yang lalu pemuda Yamin telah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan melaporkan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Setelah di Medan, penyelenggaraan Kongres baru dapat dilakukan pada 28 Oktober 1978, bertepatan dengan 50 tahun Sumpah pemuda dengan peserta 419 orang. Sejak itu Kongres Bahasa Indonesia selalu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan hingga kini penyelenggaraannya sudah mencapai bilangan ke delapan. Peserta sejak kongres pertama sampai dengan sekarang terus-

menerus meningkat sebagai bukti bahwa sebagian dari kita masih memiliki perhatian yang besar terhadap bahasa nasional.

Perhatian yang amat besar terhadap bahasa nasional itu tentulah sangat membesarkan hati mengingat dalam era globalisasi sekarang ini pengaruh bahasa asing khususnya bahasa Inggris amat besar. Kalau besarnya perhatian khalayak akan kongres bahasa Indonesia itu diartikan sebagai bukti masih besarnya kecintaan masyarakat kita kepada bahasa Indonesia, kita tidak perlu cemas akan masa depan bahasa nasional kita itu. Memang dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini makin terasa kuatnya pengaruh bahasa asing dalam pemakaian bahasa kita sehari-hari sehingga tidak sedikit di antara kita yang sangsi akan ketahanan bahasa nasional kita itu. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian pemerintah, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VIII sangat tepat.

Selanjutnya dalam forum ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan Konggres sebagai berikut.

1. Kongres Bahasa Indonesia VIII yang bertema “Pemberdayaan bahasa Indonesia memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi” ini merupakan kongres yang pertama kali diadakan dalam abad ke-21 yang penentuannya amat memperhatikan aspirasi daerah.
2. Peserta kongres terdiri atas pejabat, tokoh, pakar, budayawan, ilmuwan, sastrawan, dosen, guru, dan pecinta bahasa Indonesia yang datang dari berbagai pelosok tanah air dan kota-kota besar dunia yang negaranya menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia. Peserta Kongres Bahasa Indonesia VIII selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kongres Bahasa Indonesia I dan II 200–300 orang, Kongres Bahasa Indonesia VII 850 orang, dan Kongres Bahasa Indonesia VIII mencapai 1.047 orang, bahkan masih banyak peminat

yang terpaksa tidak mendapatkan tempat. Besarnya minat masyarakat terhadap kongres ini menggambarkan begitu besar perhatian masyarakat terhadap masalah bahasa dan sastra serta media massa.

3. Pemakalah kongres terdiri atas 63 pemakalah dalam negeri dan 18 pemakalah luar negeri. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat swakarsa (atas inisiatif sendiri) yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dipilih dari 83 abstrak yang masuk ke panitia,
4. Dalam acara pembukaan ini akan diserahkan penghargaan kepada tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik, sastrawan, pengarang sayembara mengarang cerpen remaja, pemenang sayembara mengarang puisi SLTP, serta guru pemenang sayembara pembelajaran bahasa dan guru pemenang sayembara pembelajaran sastra, serta guru pemenang sayembara menulis cerpen dan mengulas novel. Semua itu di bawah koordinasi Departemen Pendidikan nasional.
5. Pada kesempatan acara pembukaan kongres ini akan diluncurkan terbitan buku kebahasaan dan kesastraan yang berupa *Kamus Pelajar SD, SLTP, dan SLTA, Bahasa Indonesia menuju Masyarakat madani, Ensiklopedia sastra Indonesia Modern, Adab dan Adat: Refleksi sastra Nusantara, Adalah bangsa dalam Sastra?, Puisi Indonesia sebelum Kemerdekaan: Sebuah catatan Awal*, dan beberapa buku lainnya.

Kongres Bahasa Indonesia VIII ini merupakan peninjauan kembali apa yang telah dilakukan selama lima tahun dan pembahasan berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan serta media massa secara menyeluruh dalam merumuskan kebijakan nasional pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra serta media massa lima tahun ke depan.

Melalui forum ini, saya mohon kesediaan bapak menteri Koor-

dinator dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan penghargaan dan menyampaikan sambutan Wakil Presiden sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan konggres Bahasa Indonesia VIII ini.

Terima kasih

Wasalamuaalaikum wr. wb.

**Prof. Drs. A. Malik Fajar, M. Sc.**



## BIODATA PENULIS

### **Herawati**

Lahir di Yogyakarta 27 April 1954. Pendidikan terakhir, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Balai Bahasa Yogyakarta. Disiplin keilmuan yang ditekuni ialah Linguistik Indonesia dan Jawa. Pangkat terakhir: Peneliti Madya/ IVc. Alamat instansi: Balai Bahasa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta.

Karya-karyanya antara lain sebagai berikut.

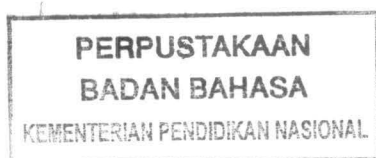
1. Negasi dalam Bahasa Jawa (2007),
2. Wacana Humor dalam Bahasa Jawa (2007)
3. Koherensi Wacana Sesorah Perkawinan Adat Jawa (2007)
4. Wacana Naratif "Wacan Bocah" dalam Djaka Lodang (2008)
5. Retorika Tekstual Paragraf Wacana Ilmiah dalam Bahasa Jawa (2009)

### **Wiwin Erni Siti Nurlina**

Dilahirkan di Purworejo, 20 November 1962. Setelah lulus S1 Jurusan Nusantara, Fakultas Sastra UGM, bekerja sebagai peneliti di Balai Penelitian Bahasa. Disiplin keilmuan yang ditekuninya ialah Linguistik Indonesia dan Jawa. Setelah beberapa tahun mengabdikan diri sebagai pegawai, lalu melanjutkan studi S-2 di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Alamat Rumah: Perum. Soka Asri Permai B-14, Kadisoka, Sleman, Telepon (0274)4395499, alamat Pos-el [erni\\_bby@yahoo.com](mailto:erni_bby@yahoo.com)

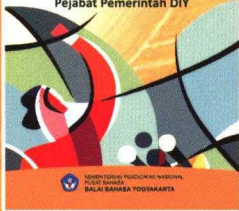
Karya (lima tahun terakhir) sebagai berikut.

1. Tata Bahasa Jawa Mutakhir (Edisi Revisi) (Kanisius, 2006)
2. Pemakaian Bahasa Indonesia Ranah Pemerintahan di Yogyakarta : Laporan Teknis (Depdiknas, 2007)
3. “Ajaran Budaya Wanita Jawa Nuansa Islami: dalam Ungkapan-Ungkapan Bahasa Jawa” dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu (editor: Puteri Roslina Abdul Wahid), hlm 308—318, (Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006)
4. “Leksikon Bahasa Jawa dalam KBBI: Dukungan Salah Satu Bahasa terhadap Bahasa Nasional” dalam Kesenambungan dan Pemantapan Bahasa Di Asia Tenggara (editor: Paitoon M. Chaiyanara), hlm 735-740, Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN, 2007
5. “Affective on Adjective Form with Intensive Sense in Javanese Language” dalam International Symposium on The Languages of Java, Hotel Santika, Semarang Indonesia 15—16 Agustus 2007
6. Tema-Rema dalam Bahasa Jawa (Ketua tim, Surya Sarana Grafika, 2008)
7. “Leksikon Pengungkap Makna ‘Aktivitas Pikiran dengan Kondisi Mental Positif’: Kekayaan Kosakata Bahasa Ibu” Makalah pada Seminar Internasional Bahasa Ibu, Gedung Merdeka, Bandung 19—20 Februari 2010.



## Laras Pidato dalam Bahasa Indonesia

Kajian pada Naskah Pidato  
Pejabat Pemerintah DIY



# Laras Pidato dalam Bahasa Indonesia

Pidato yang disampaikan oleh pejabat pemerintah pada acara tertentu merupakan peristiwa komunikasi resmi. Sesuai dengan situasi komunikasi yang resmi, idealnya penggunaan bahasanya juga resmi, yaitu bahasa yang formal. Apakah penggunaan bahasa Indonesia pada naskah-naskah pidato yang dijadikan objek penelitian ini juga merupakan bahasa Indonesia yang resmi? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penelitian secara induktif terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada naskah-naskah pidato. Penelitian yang demikian, berdasarkan pengamatan tim peneliti ini, ternyata belum pernah dilakukan, khususnya penelitian terhadap naskah-naskah pidato di Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai naskah pidato yang akan dibacakan oleh pejabat pemerintah dalam acara resmi, tentu naskah pidato disusun dengan struktur tertentu. Bagaimana struktur naskah pidato yang ada di Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Pertanyaan tersebut juga hanya bisa dijawab melalui penelitian secara induktif terhadap naskah-naskah pidato. Melalui penelitian secara induktif, dapat diungkap bagian-bagian naskah-pidato beserta urutannya. Apakah bagian-bagian naskah pidato beserta urutannya itu sudah logis dan me



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
PUSAT BAHASA  
**BALAI BAHASA YOGYAKARTA**

ISBN 9 78 9791 18 52586

